



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

---

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

TAHUN

2024

## KATA PENGANTAR

Pertanggungjawaban penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tanggung jawab Balai Diklat Industri Surabaya yang merupakan salah satu unit kerja Kementerian Perindustrian. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri merupakan salah satu kegiatan Program Pengembangan SDM Industri yang bertujuan untuk menghasilkan SDM industri yang kompeten. Balai Diklat Industri Surabaya sebagai unit kerja penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya ini merupakan gambaran pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2024. Laporan ini sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Balai Diklat Industri Surabaya untuk meningkatkan kinerja satuan unit di masa yang akan datang.

Surabaya, Januari 2025  
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya  
  
Labiba

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>A. TUGAS DAN FUNGSI BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA</b> .....	4
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA</b> .....	4
<b>C. PERAN STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA</b> .....	5
<b>D. RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2020-2024</b> 6	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
<b>A. PERENCANAAN KINERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024</b> 10	10
<b>B. RENCANA ANGGARAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024</b> 12	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
<b>A. CAPAIAN KINERJA SASARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA</b> .....	15
<b>B. KINERJA REALISASI ANGGARAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024</b> .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	42
<b>B. PERMASALAHAN DAN KENDALA</b> .....	42
<b>C. REKOMENDASI</b> .....	43
<b>LAMPIRAN</b> .....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 2 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022, menetapkan tugas Balai Diklat Industri adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;
5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri yang membawahi 2 (dua) bagian, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

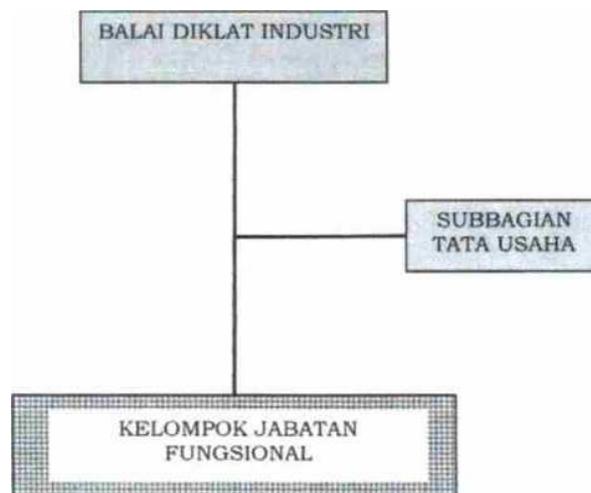
##### **a. Subbagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Diklat Industri.

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, dapat dilihat Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

### C. PERAN STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Balai Diklat Industri Surabaya merupakan unit di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Strategis Organisasi yang hendak dicapai oleh Balai Diklat Industri Surabaya adalah:

- Penerapan *good governance* dengan memanfaatkan IT dan ISO 9001-2015;
- Meningkatkan kerjasama lembaga untuk membangun kurikulum & modul berbasis kompetensi;
- Mempersiapkan BDI Surabaya dalam konsentrasi diklat di bidang elektronika,

barang modal, tekstil, dan aneka dengan spesialisasi prioritas elektronika, mekanik, dan permesinan.

d) Mengembangkan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis.

#### **D. RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2020-2024**

Renstra Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyediaan SDM Industri yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2020-2024 disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai Diklat Industri Surabaya periode 2015-2019, perubahan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri serta analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan. Dan perubahan dokumen Renstra ini masih terus berlanjut mengingat adanya evaluasi secara berkala yang kemudian menuntut adanya penyempurnaan perencanaan strategis. Pelaporan kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2022 ini merujuk pada dokumen Renstra Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2020-2024 Perubahan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Surabaya Nomor 545 Tahun 2021 pada tanggal 27 Desember 2021.

##### **1. Visi dan Misi Balai Diklat Industri Surabaya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 2 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Berdasarkan amanat yang telah ditetapkan dalam perubahan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021, sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri, maka Balai Diklat Industri Surabaya menetapkan visi “Sebagai *Center of Excellences*

penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten". Guna mencapai visi tersebut, Balai Diklat Industri Surabaya merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- 2) Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, up-skilling, dan re-selling*) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1;
- 4) Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;
- 5) Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;
- 6) Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;
- 7) Membangun dan mengembangkan *smart training facility*; dan
- 8) Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina industri atas penugasan dari BPSDMI.

Misi tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yang terangkum dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri.

## 2. Tujuan Balai Diklat Industri Surabaya

Perwujudan Visi dan melaksanakan Misi tersebut ditetapkan tujuan **'Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional'**. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah kontribusi lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan.

Untuk mencapai tujuan seperti yang diuraikan di atas, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Diklat Industri Surabaya. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.

## 3. Sasaran Kementerian Perindustrian

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*), perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan organisasi. Dari hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2019 - 2024, terdapat perbaikan terhadap sasaran strategis dan indikator- indikator kinerja Balai Diklat Industri Surabaya. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

Meningkatnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) Industri dalam perekonomian Nasional

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan, memantapkan, dan memperluas wawasan SDM Industri tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan dunia industri serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Program pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi merupakan program penyiapan tenaga kerja industri yang meliputi *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* dengan skema 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja) yang mengacu pada standard kompetensi kerja dan lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri.

Penyediaan SDM kompeten dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan di Balai Diklat Industri Surabaya atau langsung dilaksanakan di industri. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini adalah "Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi".

#### **b. Perspektif Proses Internal**

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu adanya inkubator industri yang tumbuh. Melalui program inkubator bisnis diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru.

#### **c. Perspektif Pembelajaran dan Organisasi**

Perspektif ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan beberapa indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya.

2) Tewujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja:

- i. Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya
- ii. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya

3) Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Kompetensi, profesionalisme ASN Balai Diklat Industri Surabaya.

4) Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti dan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI).

Dari beberapa indikator kinerja diatas, yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) dari Balai Diklat Industri Surabaya adalah:

1. Kontribusi lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan; dan
2. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024**

Perencanaan kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 ini disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renkin/RKT) Tahun 2024 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin/PK) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 disusun pada tahun anggaran 2023 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024.

Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 merupakan perencanaan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan hasil reviu dikarenakan adanya perubahan target pada tataran Kementerian Perindustrian serta penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja. Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024 ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024 disusun dengan berdasar pada perencanaan yang ada dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 serta mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2023 dan beberapa penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam DIPA Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 serta perubahan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Hasil evaluasi dan beberapa penyesuaian ini berdampak pada target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024. Penyesuaian ini mencakup perubahan dan penyempurnaan sasaran strategis, indikator kinerja maupun target kinerja dan penganggarnya. Perubahan dan penyempurnaan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya

tahun 2024 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Perjanjian Kinerja (Perkin/PK) Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024

TUJUAN					
Kode	Sasaran Tujuan		Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	1	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	3.595	Orang
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi*	3.590	Orang
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS					
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Inkubator industri yang tumbuh*	1	Tenant
PERSPEKTIF LEARN AND GROWTH					
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya	80	Persen
SK 4	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	76	Nilai
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	75	Nilai
SK 5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	72	Indeks
SK 6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92,2	Persen

\* Indikator Kinerja Utama (IKU)

## B. RENCANA ANGGARAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024 dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan penargetan yang telah ditetapkan pada tahun 2024, didukung dengan pembiayaan APBN (Pagu Awal) sebesar **Rp.27.075.609.000,-** kemudian direvisi menjadi **Rp. 34.307.553.000,-**.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Industri, Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024 mengalokasikan pembiayaan tersebut pada 2 (dua) output, yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan anggaran sebesar Rp.25.135.000.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp.7.465.609.000,-

Selama tahun 2024 terjadi beberapa kali revisi pagu anggaran Balai Diklat BDI Surabaya yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.  
Perubahan Pagu Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024

DIPA	Tanggal	Pagu	Keterangan
DIPA Awal	24 November 2023	Rp.27.075.609.000	
Revisi Ke-1	12 Januari 2024	Rp.27.075.609.000	Revisi POK KPA
Revisi Ke-2	23 Januari 2024	Rp.32.600.609.000	Penambahan Anggaran Diklat 3 in 1
Revisi Ke-3	24 Januari 2024	Rp.32.600.609.000	Revisi POK KPA
Revisi Ke-4	31 Januari 2024	Rp.32.600.609.000	Blokir AA
Revisi Ke-5	20 Februari 2024	Rp.32.600.609.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK
Revisi Ke-6	23 April 2024	Rp.32.600.609.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK
Revisi Ke-7	29 Mei 2024	Rp.32.600.609.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK

Revisi Ke-8	14 Juli 2024	Rp.32.600.609.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK
Revisi Ke-9	15 Agustus 2024	Rp.32.600.609.000	Pergeseran Belanja Modal
Revisi Ke-10	17 September 2024	Rp.34.307.553.000	Penambahan Anggaran Diklat 3 in 1 dan Penambahan Anggaran Belanja Pegawai dari Relaksasi Blokir AA
Revisi Ke-11	14 Oktober 2024	Rp.34.307.553.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK
Revisi Ke-12	8 November 2024	Rp.34.307.553.000	Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-13	11 November 2024	Rp.34.307.553.000	Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-14	17 November 2024	Rp.34.307.553.000	Blokir SPPD Rp.87.462.000
Revisi Ke-15	28 November 2024	Rp.34.307.553.000	Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-16	3 Desember 2024	Rp.34.307.553.000	Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-17	13 Desember 2024	Rp.34.307.553.000	Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-18	24 Desember 2024	Rp.34.307.553.000	Hal 3 DIPA dan Pemutakhiran POK

Perubahan pagu Balai Diklat Industri Surabaya selama tahun 2024 dari yang awalnya **Rp.27.075.609.000,-** setelah direvisi menjadi **Rp.34.307.553.000,-** Pagu anggaran revisi tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 komponen kegiatan, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.  
Rincian Output, Sub Output dan Komponen Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024  
(Dalam Rupiah)

<b>Kode</b>	<b>Output/Sub Output/Komponen</b>	<b>Anggaran</b>
<b>DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>26.720.492.000</b>
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100.000.000
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	200.000.000
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	300.000.000
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.000.000.000
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	25.120.492.000
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7.587.061.000</b>
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.137.061.000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	450.000.000

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Balai Diklat Industri Surabaya dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja ini bukan hanya menguraikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja Balai Diklat Industri Surabaya dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024, namun juga menguraikan capaian kinerja lain, yaitu kinerja keuangan. Analisis pencapaian dilengkapi dengan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya.

#### A. CAPAIAN KINERJA SASARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024, kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 mencakup 1 (satu) sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), 1 (satu) sasaran strategis dalam perspektif internal process dan 4 (empat) sasaran strategis dalam perspektif *Learn and Growth*, dimana untuk kinerja diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja utama (IKU) termuat dalam perspektif stakeholder.

##### 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas

Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas yang dimaksud adalah lulusan pelatihan vokasi atau diklat 3 in 1 BDI Surabaya. Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja:

- 1) Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi dengan target tahun 2024 sebanyak 3.590 orang. **Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi**, diukur melalui penghitungan jumlah lulusan diklat 3 in 1 yang diselenggarakan Balai Diklat Industri Surabaya yang diterima kerja di industri serta lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompeten.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Industri Surabaya.

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) Industri dalam perekonomian Nasional	Lulusan Pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi*	3.590	4.490	125,1	Orang

• Indikator Kinerja Utama (IKU) Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.2  
Realisasi IKU dari Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas

IK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Lulusan Pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	860	1.409	2.506	4.759	10.474	3.120	7.916	3.529	5.268	4.490	Orang

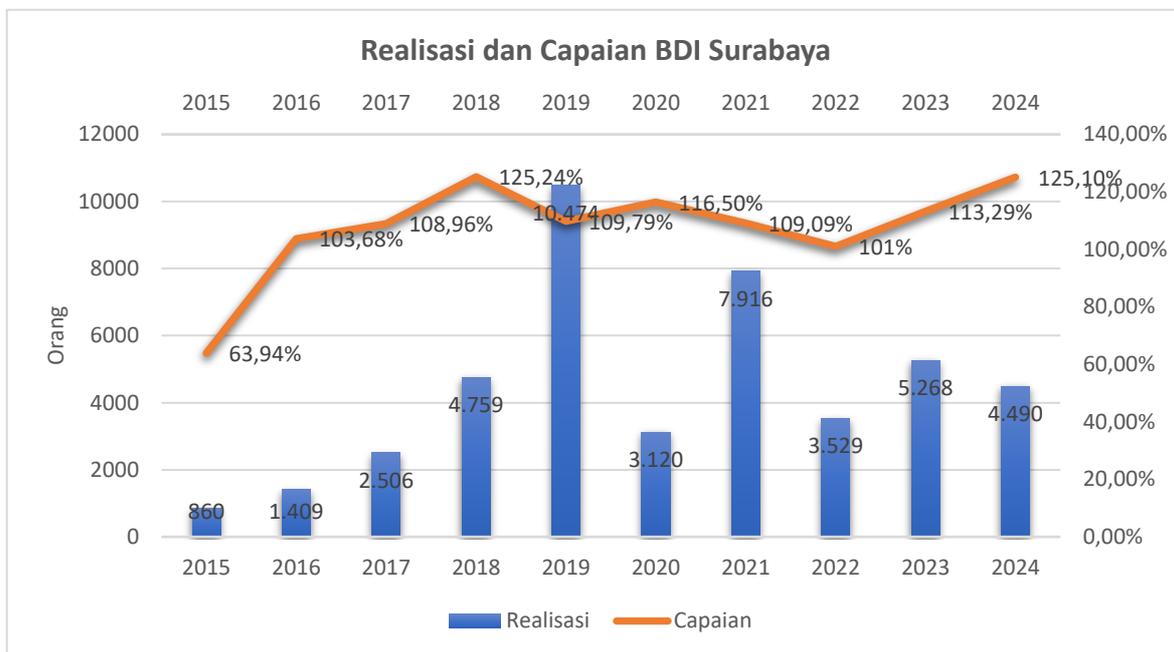
Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.3  
Capaian IKU dari Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas

IK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Lulusan Pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	63,94	103,68	108,96	125,24	109,79	116,5	109,09	101	113,29	125,1	Persen

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.1  
Realisasi dan Capaian Indikator Lulusan Pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi



Tabel 3.4  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas  
IK : Lulusan Pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	URUTAN
BDI Yogyakarta	3640	5155	141,6	1
BDI Jakarta	3650	4665	127,8	2
BDI Padang	2670	3370	126,2	3
BDI Surabaya	3590	4490	125,1	4
BDI Makassar	2350	2938	125	5
BDI Medan	1900	2200	115,8	6
BDI Denpasar	1600	1624	101,5	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Angka realisasi indikator kinerja utama dari Tersedianya SDM Industri yang kompeten pada tahun 2024, pelaksanaan diklat di BDI Surabaya sangat baik dengan capaian sebesar 125,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Diklat Industri Surabaya

bergerak dengan optimal untuk mencetak tenaga kerja. Tahun 2024, dari segi efisiensi anggaran, BDI Surabaya mampu mengefisiensi anggaran kurang lebih 25% dibandingkan dengan indeks pelaksanaan diklat tahun 2023. Untuk perbandingan dengan satker lain, Capaian output BDI Surabaya menempati posisi ke 4, dengan target output yang paling tinggi. Capaian ini didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik diantara seluruh stakeholder yang terkait, dimana pada tahun 2024 Balai Diklat Industri Surabaya masih bekerjasama dengan DPR RI Komisi VII, serta pihak industri-industri sebagai lokus pelaksanaan dan penempatan kerja, Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan, sekolah-sekolah dan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses perekrutan peserta maupun dari pihak Asosiasi serta unit- unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kendala dan permasalahan yang berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis ini antara lain adalah:

- 1) Kegiatan diklat berbasis aspirasi masyarakat yang dilaksanakan selama bulan Januari sangat padat dan dengan jumlah pegawai yang terbatas, sehingga kurang maksimalnya pelayanan internal bagi pegawai terkait persiapan pelaksanaan diklat di luar kota yang membutuhkan waktu lebih lama.
- 2) Adanya kegiatan diklat pembatik tulis dengan peserta khusus disabilitas menjadi tantangan tersendiri bagi BDI Surabaya sebagai penyelenggara. Dari kerjasama dengan mitra baru dan pengenalan dengan peserta yang memiliki kebutuhan khusus serta perlunya perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing peserta dibutuhkan rasa empati dan proaktif yang lebih tinggi dari para pegawai.
- 3) Tempat pelatihan yang beberapa berada di area yang terbatas akses transportasi umum, mengakibatkan masih adanya peserta yang tidak konsisten untuk mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, sehingga hal ini berdampak pada berkurangnya lulusan dari target yang telah ditentukan.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BDI Surabaya, sehingga hal ini berdampak pada masih diperlukannya kegiatan diklat dan uji kompetensi yang dilaksanakan di industri untuk diklat yang diselenggarakan di industri yang merupakan lokus penempatan kerja.
- 5) Masih kurangnya jumlah kompetensi asesor BDI Surabaya yang sesuai dengan jenis diklat yang dilaksanakan.

Meski pencapaian sasaran strategis ini masih menemui kendala dan permasalahan, namun penyelenggaraan diklat oleh Balai Diklat Industri Surabaya

dalam rangka penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing tetap perlu dilaksanakan berkelanjutan, karena program ini sangat berdampak secara signifikan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Guna mengoptimalkan manfaat tersebut maka Balai Diklat Industri Surabaya melakukan beberapa upaya dan ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan kegiatan diklat oleh Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun berikutnya antara lain adalah:

- 1) Koordinasi lebih intensif dengan semua stakeholder sehingga apabila terjadi perubahan jadwal terkait pelaksanaan program dampaknya dapat diminimalkan.
- 2) Pelaksanaan promosi dan sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai manfaat diklat, sehingga pemahaman calon peserta diklat akan manfaat dari diklat ini lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong calon peserta untuk memiliki minat yang lebih untuk mengikuti diklat dan bekerja di industri.
- 3) Penekanan komitmen bagi calon peserta untuk mengikuti diklat dan bekerja melalui seleksi calon peserta yang lebih mendalam serta melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan peserta mengenai kemanfaatan dari mengikuti diklat dan pentingnya harus bekerja untuk menjamin kehidupan mendatang.
- 4) Menambah jumlah skema kompetensi LSP P1 BDI Surabaya sesuai jenis diklat yang dilaksanakan.

## 2. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Terselenggaranya Urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan yang dimaksud adalah adanya inkubator industri yang tumbuh. Balai Diklat Industri Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan Inkubator Bisnis tahun pertama pada tahun 2024 dengan menghasilkan 5 tenant. Kegiatan inkubator bisnis ini menjadi awal kembali bagi Balai Diklat Industri Surabaya untuk menjaring calon tenant yang siap melakukan inkubasi bisnis yang telah dimiliki atau yang sedang mulai merintis usaha.

Inkubator Bisnis BDI Surabaya telah melanjutkan kegiatan di tahun kedua ini dengan menjaring calon tenant baru yang potensial dari mahasiswa maupun masyarakat luas yang memiliki atau akan mengembangkan bisnisnya melalui inkubator bisnis BDI Surabaya. Selain itu, telah dilakukannya beberapa kegiatan untuk mengenalkan dan mempromosikan Inkubator Bisnis BDI Surabaya sebagai program baru untuk pengembangan bisnis maupun wirausaha bagi masyarakat luas antara lain

kegiatan Entrepreneurial Ignition Competition (program seleksi & rekrutmen tenant); Workshop Ideasi Bisnis; Workshop Inkubasi; Bootcamp pendanaan *startup* & persiapan *Bussines Matching*; Bimbingan & Konsultasi Pengembangan Usaha; Pendampingan Pengembangan Usaha.

Kegiatan *Bussines Matching* dilakukan melalui kegiatan Pameran antara lain:

1. Surabaya Start up Fest 2.0
2. Industrial Festival
3. IDEA Expo

Dan juga ada pendampingan pembentukan badan usaha (legalitas) bagi para tenant terpilih. Selain itu, BDI Surabaya juga aktif mengirimkan para tenant terpilih untuk mengikuti pameran produk inovasi yang diselenggarakan oleh beberapa instansi daerah maupun swasta serta mengirimkan peserta tenant untuk mengikuti pelatihan pengembangan produk sesuai bidang yang digeluti yaitu otomotif.

Jika melihat dari target yang ditetapkan untuk BDI Surabaya sebanyak 1 tenant, maka jumlah tenant yang lulus mengikuti program inkubator bisnis BDI Surabaya tahun 2024 sebanyak 5 tenant yang sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Inkubator Bisnis BDI Surabaya mampu mencapai target optimal dalam membina 5 tenant karena mampu melihat dan menganalisis peluang kurangnya pembinaan penumbuhan wirausaha di sektor Pendidikan Tinggi dimana Kota Surabaya merupakan lokasi yang cukup strategis yaitu dengan dikelilingi banyak Perguruan Tinggi sehingga peluang dan hasil analisis ini menjadi dasar untuk selanjutnya Inkubator Bisnis BDI Surabaya menyusun serangkaian tahapan program yang efektif dan berhasil dalam menginkubasi wirausaha baru.

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran Strategis	IK	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian(%)	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inkubator industri yang tumbuh	1	5	500	Tenant

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.6  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran Strategis	IK	2023	2024	Satuan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inkubator industri yang tumbuh	2	5	Tenant

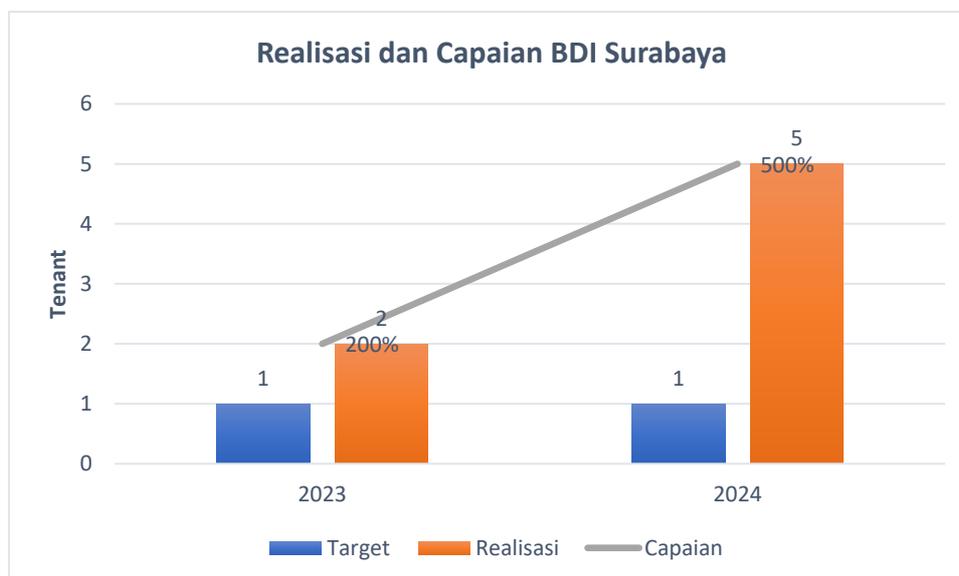
Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran Strategis	IK	2023	2024	Satuan
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inkubator industri yang tumbuh	200	500	Persen

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.2  
Realisasi dan Capaian Inkubator Bisnis BDI Surabaya



Tabel 3.8  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian  
yang berdaya saing dan berkelanjutan  
IK : Inkubator Industri yang tumbuh

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Surabaya	1	5	500	1
BDI Yogyakarta	3	5	166,6	2
BDI Jakarta	5	7	140	3
BDI Denpasar	23	25	108,7	4
BDI Padang	10	10	100	5
BDI Makassar	10	10	100	6
BDI Medan	4	4	100	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Pada tahun 2024, dari segi efisiensi anggaran BDI Surabaya baru melaksanakan tahun kedua kegiatan Inkubator Bisnis sehingga efisiensi anggaran bisa tercapai sebesar 100%. Untuk perbandingan dengan satker lain, Capaian output BDI Surabaya menempati posisi ke-1 dengan target output yang sudah mulai bersaing dengan satker yang lain.

### 3. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri yang dimaksud adalah meningkatnya optimalisasi penggunaan hasil produksi dalam negeri, terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Selain itu memberikan preferensi kepada barang/jasa dari produksi dalam negeri yang ada pada proyek-proyek tersebut. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya dengan target tahun 2024 sebanyak 80%.

**Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya**, diukur melalui penghitungan

jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh BDI Surabaya yang menggunakan produksi dalam negeri. Indikator ini merupakan salah satu indikator kinerja utama BDI Surabaya.

Tabel 3.9  
Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran Strategis	IK	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian(%)	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya*	80	95,65	119,6	Persen

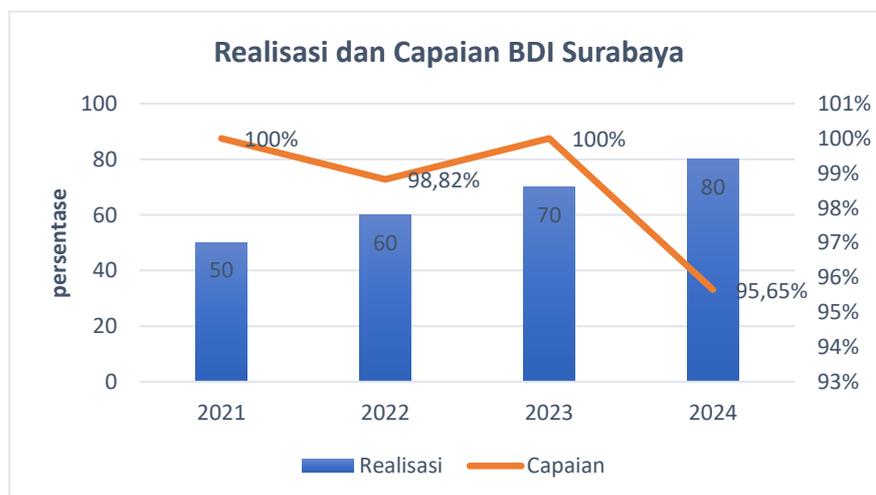
Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel. 3.10  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri

Indikator Kinerja		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya*	Target	-	-	50	60	70	80	Persen
	Realisasi	100	100	100	98,82	100	95,65	Persen

\*Indikator Kinerja Utama (IKU) Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.3  
Realisasi dan Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri BDI Surabaya



Tabel. 3.11  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri  
IK : Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri  
Surabaya

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Denpasar	80	99,88	125	1
BDI Yogyakarta	80	99,26	124,1	2
BDI Jakarta	80	99,03	123,8	3
BDI Makassar	80	98,18	123	4
BDI Surabaya	80	95,65	119,6	5
BDI Padang	80	74,29	92,86	6
BDI Medan	80	67,78	84,73	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Berdasarkan informasi selama pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Surabaya, pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pengadaan terkait penyelenggaraan diklat dan pengadaan barang modal. Sebagian besar pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya adalah pengadaan terkait penyelenggaraan diklat, seperti konsumsi dan peralatan dan atau perlengkapan untuk peserta diklat. Sebagai contoh diantaranya adalah pengadaan konsumsi diklat, hampir sebagian besar adalah pengadaan dari penyedia di sekitar lokasi pelaksanaan diklat. Terkait pengadaan barang modal ini berupa peralatan elektronik dan peralatan kantor, namun masih terdapat kebutuhan peralatan yang tidak memiliki TKDN sehingga perlu dilakukan inventarisasi peralatan yang tidak memiliki TKDN. Selain itu, untuk perbandingan dengan satker lain, capaian output BDI Surabaya pada tahun 2024 menempati posisi ke-6 dengan target output penggunaan produk dalam negeri mencapai 121,6%.

#### 4. Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima yang dimaksud adalah meningkatnya Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- 1) Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya dengan target tahun 2024 sebanyak nilai 76.
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya dengan target tahun 2024 sebanyak nilai 75.

**Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya**, diukur melalui penghitungan Laporan Keuangan satker yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya**, diukur melalui penghitungan Nilai SAKIP satker yang dinilai oleh TIM SAKIP Kementerian Perindustrian.

Tabel 3.12  
Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Kegiatan	IK	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian(%)	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangann Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	76	98,5	129,6	Nilai
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	75	78,3	104,4	Nilai

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.13  
Realisasi IKU dari Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Kegiatan	IK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	n.a.	n.a	n.a.	83,05	90,5	94,25	98,5	Nilai

pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	89,68	78,05	75,43	79,58	77,05	77,15	78,3	Nilai
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

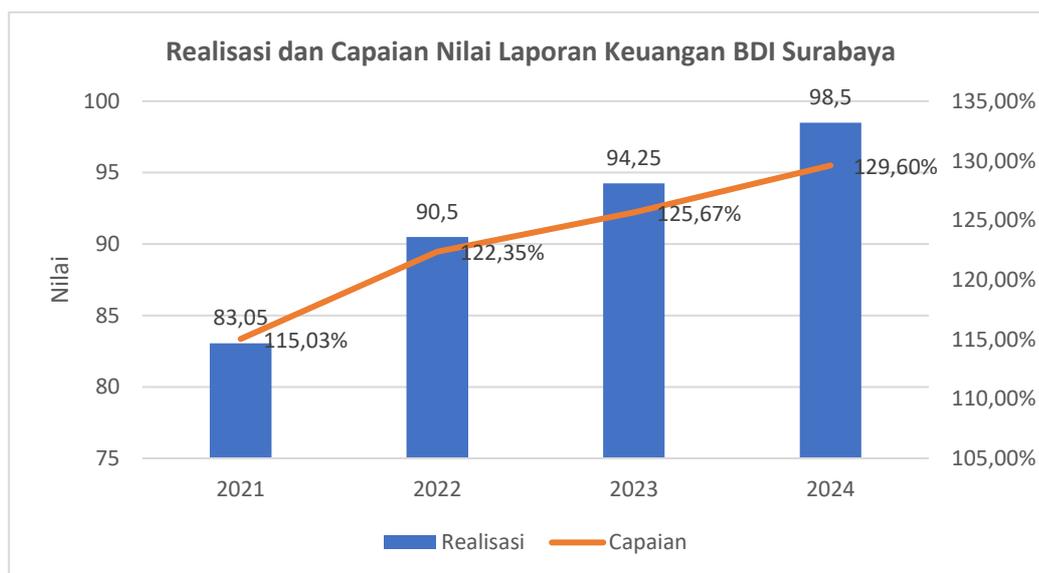
Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.14  
Capaian IKU dari Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

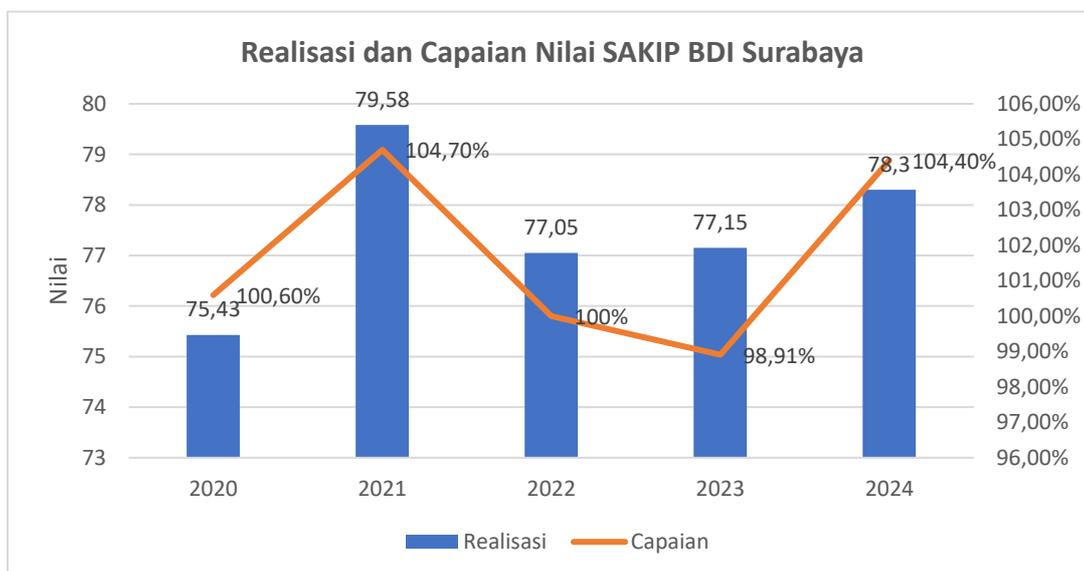
Sasaran Kegiatan	IK	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	n.a.	115,03	122,3	125,67	129,6	Persen
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	100,6	104,7	100	98,91	104,4	Persen

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.3  
Realisasi dan Capaian Nilai Laporan Keuangan BDI Surabaya



Gambar 3.4  
Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP BDI Surabaya



Tabel 3.15  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima  
IK : Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Yogyakarta	75	98	130,6	1
BDI Surabaya	76	98,5	129,6	2
BDI Jakarta	78	98	125,6	3
BDI Denpasar	78	94,9	121,6	4
BDI Makassar	76	92,25	121,4	5
BDI Medan	78	92,45	118,5	6
BDI Padang	78	85,8	110	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Tabel. 3.16  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima  
IK : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Jakarta	72	81,95	113,8	1
BDI Padang	73	81,50	111,6	2
BDI Yogyakarta	75	80,30	107,1	3
BDI Medan	72	75,25	104,5	4
BDI Surabaya	75	78,3	104,4	5
BDI Makassar	76	78,35	103,1	6
BDI Denpasar	80	80,7	101	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Dari besaran nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya yang sebesar 98,5 menunjukkan bahwa secara umum Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya sudah baik. Tentunya hal ini diperoleh karena secara berkala dilakukan koordinasi yang baik dengan Biro Keuangan dan juga pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan anggaran. Dan juga dilakukan monitoring secara berkala dalam tahun berjalan.

Dari Tabel 3.14 dan 3.15 dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai dan capaian SAKIP dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami nilai yang fluktuatif, dan pada tahun 2024 nilai SAKIP BDI Surabaya sudah mencapai target. Ketercapaian nilai SAKIP pada tahun 2024 ini dicapai dari melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam pelaksanaan evaluasi secara berkala dari tahun sebelumnya baik terhadap dokumen perencanaannya maupun dalam proses pelaksanaan dan pelaporan, serta lebih meningkatkan konsultasi dan pendampingan dengan auditor dalam proses pelaksanaan kinerja berjalan, sehingga dapat lebih tepat dalam mengidentifikasi permasalahan dan resiko yang mungkin terjadi secara lebih dini, dan dapat melakukan perbaikan dan atau pencegahan akan terjadinya kendala- kendala yang dimungkinkan akan terjadi.

Pada tahun 2024, untuk perbandingan dengan satker lain, capaian output BDI

Surabaya untuk indikator kinerja Nilai Laporan Keuangan menempati posisi ke-2 dengan realisasi output mencapai 129,6%. Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP menempati posisi 5 dengan realisasi output sebesar 104,4% dari target.

**Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian**

Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian yang dimaksud adalah meningkatnya kualitas sikap ASN kementerian perindustrian serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

- 1) Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya dengan target tahun 2024 indeks sebesar 72.

**Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya,** diukur melalui penghitungan dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Tabel 3.17

Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

Sasaran Strategis	IKU	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian(%)	
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	72	83,83	116,4	Indeks

Sumber. Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.18  
Realisasi IKU dari Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

Sasaran Strategis	IKU	2021	2022	2023	2024	Satuan
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	73	70,92	87,52	83,83	Indeks

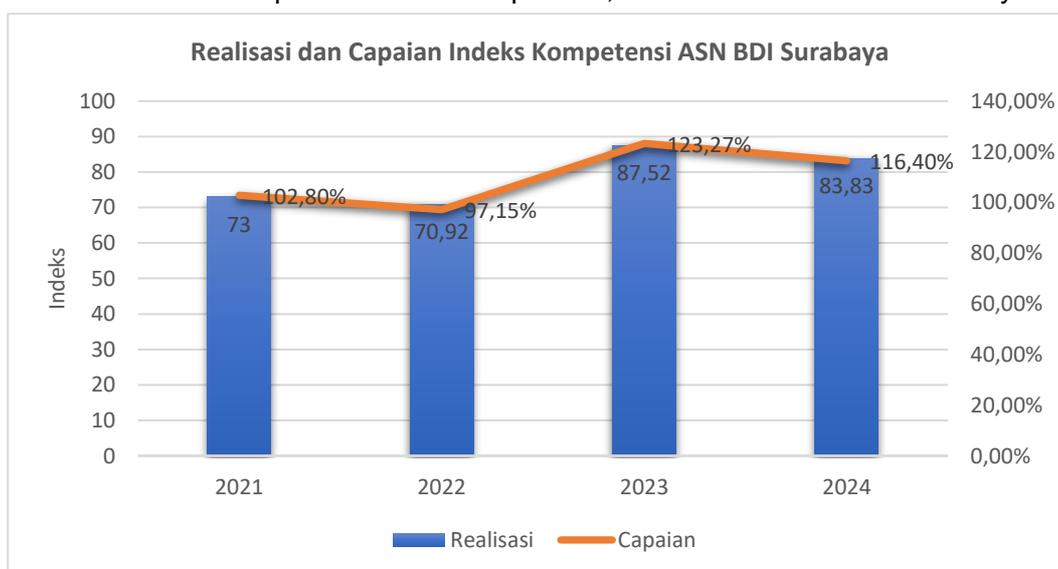
Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.19  
Capaian IKU dari Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

Sasaran Strategis	IKU	2021	2022	2023	2024	Satuan
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	102,8	97,15	123,27	116,4	Persen

Sumber . Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.4  
Realisasi dan Capaian Indeks Kompetensi, Profesional ASN BDI Surabaya



Tabel 3.20  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

IK : Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Yogyakarta	72	90,3	125,4	1
BDI Denpasar	72	85,17	118,3	2
BDI Medan	72	83,84	116,4	3
BDI Surabaya	72	83,83	116,4	4
BDI Makassar	72	83,1	115,4	5
BDI Padang	72	83	115,3	6
BDI Jakarta	72	80,7	112	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024 sebesar 83,83 indeks yang melebihi capaian target indeks sebesar 72. Hal ini termasuk dalam tingkat profesionalitas baik. Selain itu, untuk perbandingan dengan satker lain, capaian output BDI Surabaya menempati posisi ke-4 dengan realisasi output mencapai 116,4%. Beberapa hal yang agar dipertahankan agar tahun mendatang mampu mencapai target indeks profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Surabaya masih harus dilakukan perbaikan:

- 1) Meningkatkan minat dan motivasi pegawai untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan Kompetensi
- 2) Meningkatkan disiplin pegawai untuk menjaga profesionalitas ASN

#### 5. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien yang dimaksud adalah tercapainya seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti dengan target tahun 2024 sebanyak 92,2%.

**Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti**, diukur melalui penghitungan persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh BDI Surabaya.

Tabel 3.21  
Target dan Realisasi Tahun 2024 IKU dari Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran Kegiatan	IK	2024			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92,2	100	108,46	Persen
	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	--	-	-	Level

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Tabel 3.22  
Realisasi IKU dari Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran Kegiatan	IK	2021	2022	2023	2024	Satuan
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	109,3	100	100	100	Persen
	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	-	2,85	-	-	Level

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

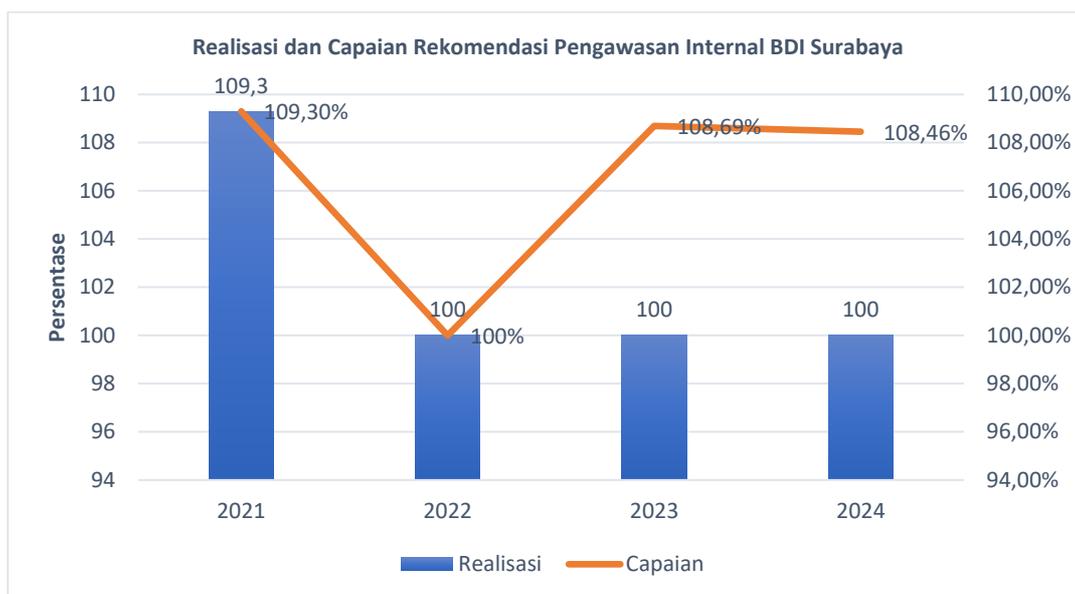
Tabel 3.23  
Capaian IKU dari Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran Kegiatan	IK	2021	2022	2023	2024	Satuan
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	109,3	100	108,69	108,46	Persen

	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	-	2,85	-	-	Level
--	--	---	------	---	---	-------

Sumber: Balai Diklat Industri Surabaya

Gambar 3.5  
Realisasi dan Capaian Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti BDI Surabaya



Tabel 3.24  
Tabel Perbandingan dengan satker lain  
Capaian IKU dari Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien  
IK : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti

SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URUTAN
BDI Surabaya	92,2	100	108,46	1
BDI Medan	92,2	100	108,46	2
BDI Padang	92,2	100	108,46	3
BDI Jakarta	92,2	100	108,46	4
BDI Yogyakarta	92,2	100	108,46	5
BDI Makassar	92,2	100	108,46	6
BDI Denpasar	92,2	100	108,46	7

Sumber : BPSDMI, diolah oleh BDI Surabaya

Pada tahun 2024, rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Balai Diklat Industri Surabaya dan selalu melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan secara tuntas setiap tahunnya dan pada tahun 2024 persentase realisasi pengawasan internal telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu mencapai 100 persen dan bila dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan, Hal ini sebagai wujud dari komitmen Balai Diklat Industri Surabaya untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis dan kinerja unit organisasi. Selain itu, pada tahun 2024 untuk perbandingan dengan satker lain, capaian output BDI Surabaya menempati posisi ke-5 dengan realisasi output sama dengan seluruh satker Balai Diklat Industri yang mencapai 108,46%. Pencapaian dari sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan, merupakan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Diklat Industri Surabaya. Pencapaian target indikator tujuan BDI Surabaya yang harus tercapai, secara periode tahunan dapat diukur sebagaimana tabel 3.25.

Tabel 3.25  
Capaian Target Renstra Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024		Satuan
		Target	Realisasi									
Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan Nonmigas	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	2.975	3.312	8.000	8.325	3.500	3.529	4.650	5268	3.590	4.490	Orang
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inkubator industri yang tumbuh	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2	1	5	Tenant
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Surabaya	n.a	n.a	50	100	60	98,82	70	100	80	95,65	Persen
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	70	n.a	72	83,05	74	90,5	76	94,25	76	98,5	Nilai
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	75	75,43	76	79,58	77	77,05	78	77,15	75	78,3	Nilai
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	70	n.a	71	73	73	70,92	71	87,52	72	83,83	Indeks
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91	100	91,5	100	92	100	92	100	92,2	100	Persen

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	Na.	3	Na.	3	2.85	4	-	-	-	Level
--	---	-----	---	-----	---	------	---	---	---	---	-------

Tabel 3.26  
Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	% Rata Rata Capaian Output	Efektifitas	% Serapan Anggaran	Efisiensi
Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan Nonmigas	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	125,1%	125,1%	Efektif	99,65%	Efisien
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inkubator industri yang tumbuh	500%	500%	Efektif	99,99%	Efisien
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri	121,6%	121,6%	Efektif	99,99%	Efisien
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Surabaya	129,6%	117%	Efektif	99,99%	Efisien
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Surabaya	104,4%		Efektif	99,99%	Efisien
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Balai Diklat Industri Surabaya	116,1%	116,1%	Efektif	99,99%	Efisien
Tercapaiannya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	108,46%	108,46%	Efektif	99,99%	Efisien

Berdasarkan tabel 3.27 dapat diketahui bahwa sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya telah terlaksana dengan baik dengan pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi dari masing-masing indikator kinerja telah tercapai secara efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, secara akuntabel, efektif dan efisien.

## **B. KINERJA REALISASI ANGGARAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, Balai Diklat Industri Surabaya mendapat alokasi anggaran DIPA sebesar Rp.34.307.553.000,00 Dari aspek capaian realisasi anggaran, BDI Surabaya diukur melalui kinerja berdasarkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran BDI Surabaya adalah sebesar Rp. 34.219.780.133 atau mencapai 99,74% persen dari Pagu APBN tahun 2024 untuk BDI Surabaya dengan nilai blokir senilai. Berikut rincian realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan BDI Surabaya berdasarkan komponen kegiatan dan berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

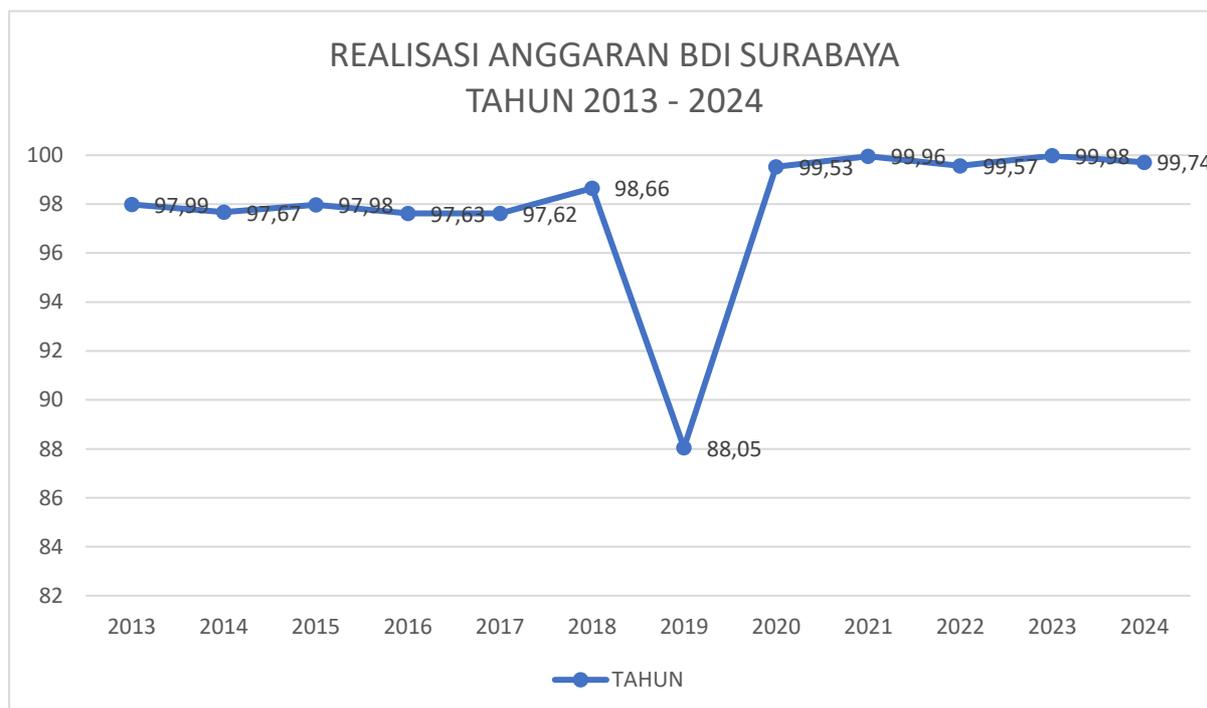
Tabel 3.27  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Output, Sub Output dan Komponen  
Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Kode	Output/Sub Output/Komponen	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
<b>DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>26.720.492.000</b>	<b>26.632.900.185</b>	<b>99,67</b>
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100.000.000	99.997.002	100
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	200.000.000	199.990.019	100
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	300.000.000	299.995.120	100
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.000.000.000	999.991.106	100
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	25.120.492.000	25.032.926.938	99,65
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7.587.061.000</b>	<b>7.586.879.948</b>	<b>100</b>

Kode	Output/Sub Output/Komponen	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.137.061.000	7.136.884.516	100
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	450.000.000	449.995.432	100

Sumber: e-Monitoring Kemenperin



Gambar. 3.1.  
Perkembangan Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Surabaya  
Tahun 2013 – 2024

Capaian kinerja realisasi anggaran Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024 ini cenderung stabil dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Balai Diklat Industri Surabaya mampu mencapai target realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,74%.

Capaian kinerja realisasi anggaran Balai Diklat Industri Surabaya pada tahun 2024, dilihat dari analisis penggunaan anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis sebagaimana pada Tabel 3.28. berikut.

Tabel 3.28  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Rencana Strategis Balai Diklat  
Industri Surabaya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			TOTAL	%
<b>DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>26.720.492.000</b>	<b>26.632.900.185</b>	<b>99,67</b>
4957	Pelatihan Vokasi Industri	26.720.492.000	26.632.900.185	99,67
4957.BDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	100.000.000	99.997.002	100
1	Lembaga Sertifikasi Profesi (Isp) Dan Tempat Uji Kompetensi (tuk) Bidang Industri	100.000.000	99.997.002	100
51	<i>Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (Isp) Sektor Industri</i>	<i>100.000.000</i>	<i>99.997.002</i>	<i>100</i>
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	200.000.000	199.990.019	100
1	Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi	200.000.000	199.990.019	100
52	<i>Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal Dengan Lembaga Pendidikan Non Formal Dan Lembaga Non-pendidikan</i>	<i>200.000.000</i>	<i>199.990.019</i>	<i>100</i>
4957.QDJ	Fasilitasi Dan Pembinaan Start Up	300.000.000	299.995.120	100
1	Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri	300.000.000	299.995.120	100
51	<i>Menyelenggarakan Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri</i>	<i>300.000.000</i>	<i>299.995.120</i>	<i>100</i>
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri Dan Perdagangan	1.000.000.000	999.991.106	100
1	Bangunan/gedung Pelatihan Vokasi Industri	393.555.000	393.554.656	100
58	<i>Gedung Dan Bangunan</i>	<i>393.555.000</i>	<i>393.554.656</i>	<i>100</i>
2	Peralatan Pelatihan Vokasi Industri	606.445.000	606.436.450	100
59	<i>Peralatan Pelatihan Industri</i>	<i>606.445.000</i>	<i>606.436.450</i>	<i>100</i>
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	25.120.492.000	25.032.926.938	99,65
1	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)	25.120.492.000	25.032.926.938	99,65
51	<i>Pelatihan Industri (skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 In 1 Sektor Industri Makanan Dan Minuman</i>	<i>2.046.531.000</i>	<i>2.046.520.518</i>	<i>100</i>
52	<i>Pelatihan Industri (skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 In 1 Sektor Industri Tpt</i>	<i>10.061.688.000</i>	<i>9.974.183.238</i>	<i>99,13</i>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024  
Balai Diklat Industri Surabaya

53	<i>Pelatihan Industri (skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 In 1 Sektor Industri Otomotif</i>	3.800.086.000	3.800.075.918	100
55	<i>Pelatihan Industri (skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 In 1 Sektor Industri Elektronika</i>	8.773.925.000	8.773.886.767	100
99	<i>Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)</i>	438.262.000	438.260.497	100
WA	Program Dukungan Manajemen	7.587.061.000	7.586.879.948	100
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	7.587.061.000	7.586.879.948	100
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.137.061.000	7.136.884.516	100
994	Layanan Perkantoran	7.137.061.000	7.136.884.516	100
1	<i>Gaji Dan Tunjangan</i>	4.737.061.000	4.736.893.183	100
2	<i>Operasional Dan Pemeliharaan Kantor</i>	2.400.000.000	2.399.991.333	100
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	450.000.000	449.995.432	100
4	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri	450.000.000	449.995.432	100
51	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran</i>	1.000.000	1.000.000	100
52	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>	79.588.000	79.587.500	100
53	<i>Pengelolaan Keuangan</i>	36.168.000	36.166.959	100
54	<i>Pengelolaan Kepegawaian</i>	273.689.000	273.687.586	100
55	<i>Pelayanan Umum Dan Perlengkapan</i>	59.555.000	59.553.387	100
	<b>T O T A L</b>	34.307.553.000	34.219.780.133	99,74

Sumber: E-Monitoring Kemenperin per tanggal 17 Januari 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pencapaian kinerja yang telah diuraikan dalam sebelumnya, secara garis besar Balai Diklat Industri Surabaya telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja peningkatan lulusan SDM industri yang kompeten dengan target sebanyak 3.590 orang, meski terdapat output yang ditetapkan belum dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian sasaran Balai Diklat Industri Surabaya disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena sudah dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dari tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Sasaran-sasaran strategis Balai Diklat Industri Surabaya perspektif *stakeholder* perspektif proses internal sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2024 berhasil dicapai dengan nilai capaian sebagian besar indikator kinerja utama diatas 100 persen.

#### **B. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BDI Surabaya selama tahun 2024 guna pencapaian target kinerja adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan diklat berbasis aspirasi masyarakat yang dilaksanakan selama bulan Januari sangat padat dan dengan jumlah pegawai yang terbatas, sehingga kurang maksimalnya pelayanan internal bagi pegawai terkait persiapan pelaksanaan diklat di luar kota yang membutuhkan waktu lebih lama.
2. Adanya kegiatan diklat pembatik tulis dengan peserta khusus disabilitas

menjadi tantangan tersendiri bagi BDI Surabaya sebagai penyelenggara. Dari pertemuan dengan mitra baru dan pengenalan dengan peserta yang memiliki kebutuhan khusus serta perlunya perlakuan yang berbeda terhadap masing-masing peserta dibutuhkan rasa empati dan proaktif yang lebih tinggi dari para pegawai.

3. Tempat pelatihan yang beberapa berada di area yang terbatas akses transportasi umum, mengakibatkan masih adanya peserta yang tidak konsisten untuk mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, sehingga hal ini berdampak pada berkurangnya lulusan dari target yang telah ditentukan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BDI Surabaya, sehingga hal ini berdampak pada masih diperlukannya uji kompetensi yang dilaksanakan di industri untuk diklat yang diselenggarakan di industri yang merupakan lokasi penempatan kerja.
5. Masih kurang memadainya skema kompetensi yang dimiliki oleh LSP P1 Balai Diklat Industri Surabaya guna mengakomodasi kegiatan uji kompetensi sesuai dengan diklat yang dilaksanakan.
6. Keterbatasan produk berTKDN dalam pengadaan barang dan jasa BDI Surabaya
7. Keterbatasan pelaksanaan diklat fungsional yang diselenggarakan oleh instansi pembina, sehingga beberapa fungsional yang ada di BDI Surabaya belum dapat memenuhi

### **C. REKOMENDASI**

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan kualitas perencanaan yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Balai Diklat Industri Surabaya, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka perencanaan dan pemantapan program diklat peningkatan kualitas SDM Industri melalui sistem 3 in 1.
2. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan sekolah-sekolah maupun masyarakat dalam rangka menjaring calon tenaga kerja industri baru yang kompeten. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pelaksanaan promosi dan sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai manfaat diklat,

sehingga pemahaman calon peserta diklat akan manfaat dari diklat ini lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong calon peserta untuk memiliki minat yang lebih untuk mengikuti diklat dan bekerja di industri.

3. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan industri-industri dalam rangka memperkuat jaringan penempatan kerja bagi lulusan diklat 3 in 1.
4. Peningkatan upaya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, baik terhadap pegawai Balai Diklat Industri Surabaya sendiri, maupun personel yang menjadi pelaksana kerjasama penyelenggaraan diklat. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah penyusunan skema pelaksanaan monitoring pelaksanaan diklat dan evaluasi penempatan kerja.
5. Peningkatan produktifitas kerja pegawai di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya.
6. Peningkatan produktifitas dan kualitas sarana prasarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Surabaya sebagai unit pelaksana teknis pencetak tenaga kerja industri yang kompeten.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

- a. Penambahan jumlah asesor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri Surabaya, melalui pengikutsertaan pegawai Balai Diklat Industri Surabaya untuk mengikuti diklat asesor.
- b. Penekanan komitmen bagi calon peserta untuk mengikuti diklat dan bekerja melalui seleksi calon peserta yang lebih mendalam serta melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan peserta mengenai kemanfaatan dari mengikuti diklat dan pentingnya harus bekerja untuk menjamin kehidupan mendatang.
- c. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan mengenai budaya kerja sebagaimana merujuk pada ketentuan yang ada dalam ISO 9001:2015.
- d. Peningkatan nilai kelayakan manajemen kinerja Balai Diklat Industri Surabaya dalam pemenuhan kriteria dan ketentuan dalam sistem ISO 9001:2015.

Sehubungan telah diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI Surabaya Nomor : 8/IJ-IND.2/LHE/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023, dilakukan Langkah-langkah kegiatan untuk meningkatkan nilai SAKIP BDI Surabaya tahun depan yaitu :

1. Melakukan penyempurnaan Renstra khususnya terhadap Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan berorientasi outcome (yaitu pada Indikator Kinerja Inkubator Bisnis) dan target yang tidak meningkat (yaitu pada mitra industri Kerjasama pelatihan vokasi) serta mengendalikan keselarasan keseluruhan dokumen perencanaan kinerja
  - Penyempurnaan Renstra terhadap Indikator Kinerja Inkubator Bisnis yang belum memenuhi kriteria SMART dan berorientasi outcome sudah dilakukan BDI Surabaya dengan melakukan koordinasi dengan BPSDMI agar indikator kinerja Inkubator Bisnis bisa direvisi agar memenuhi kriteria SMART, penjelasan indicator kinerja diuraikan lebih lanjut dalam reviu renstra (notulensi terlampir), selain itu disampaikan kepada Tim Inkubator Bisnis agar dalam pelaksanaannya dapat berpedoman pada Permenkop dan UKM Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
  - Jumlah Mitra Industri yang bekerjasama dengan BDI Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 88 mitra, dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 164 mitra, turun hampir 50%. Hal ini dapat dijelaskan dikarenakan di tahun 2022 diklat jointer cukup banyak dan penempatan tersebar lebih luas, sedangkan di tahun 2023 pelaksanaan diklat jointernya tidak banyak penempatan sehingga mempengaruhi jumlah mitra yang bekerjasama dengan BDI, namun dari segi jumlah skema diklat yang dilaksanakan, pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022 (dokumen terlampir)
  - Dalam rangka mengendalikan keselarasan keseluruhan dokumen perencanaan kinerja BDI Surabaya, juga telah ditetapkan mekanisme berupa SOP Monev Dokumen Perencanaan Kinerja (terlampir).
2. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala baik secara mandiri maupun berjenjang, menjelaskan efisiensi penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategic, dan selalu mendokumentasi aktifitas yang dilakukan.
  - BDI Surabaya telah melaksanakan evaluasi berkala secara mandiri maupun berjenjang dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala (notulensi terlampir), monitoring kegiatan melalui ALKI, aplikasi SIDIA.
  - Terkait penjelasan efisiensi penggunaan anggaran, telah dilaksanakan oleh BDI Surabaya melalui rapat koordinasi secara berkala (notulensi terlampir).
  - Dokumentasi Aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh BDI Surabaya disimpan di Cloud Internal BDI Surabaya.

3. Menetapkan/menyempurnakan pedoman penyusunan LAKIP (sesuai dengan Permenpan RB no 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu dengan menambahkan penjelasan terkait efisiensi sumber daya untuk meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta menjamin kevalidan data capaian kinerja atas seluruh kriteria penilaian evaluasi AKIP dan memanfaatkan hasil LAKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja (startegi/kebijakan/anggaran) tahun berikutnya.

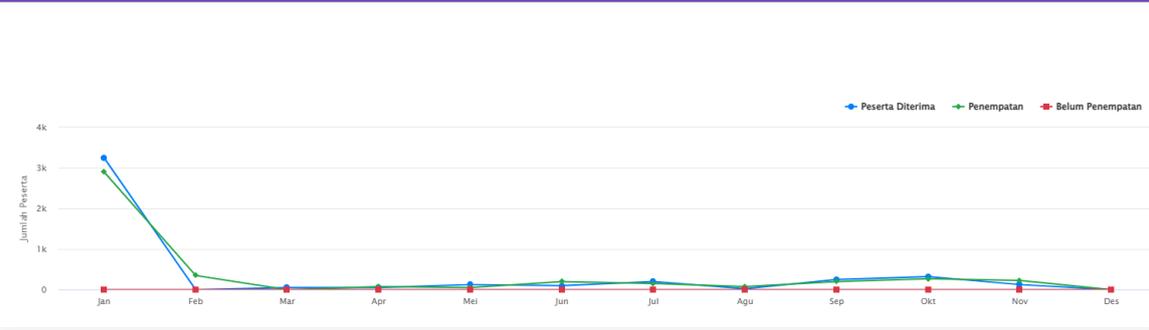
BDI Surabaya telah melakukan upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan kualitas LAKIP dengan menambahkan penjelasan terkait efisiensi sumber daya untuk meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta menjamin kevalidan data capaian kinerja atas seluruh kriteria penilaian evaluasi AKIP dan memanfaatkan hasil LAKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja (startegi/kebijakan/anggaran).

## **LAMPIRAN**

Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2024

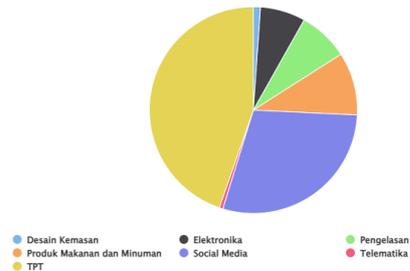
#	Penyelenggara	Target	Realisasi	Progress	%
1	BDI Surabaya	0	4.490	<div style="width: 0%;"></div>	0%
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>4.490</b>	<div style="width: 0%;"></div>	<b>0%</b>

Realisasi Peserta Diklat per Bulan pada Tahun 2024



Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2024

#	Kompetensi	Realisasi	%
1	Desain Kemasan	50	1%
2	Elektronika	315	7%
3	Pengelasan	350	8%
4	Produk Makanan dan Minuman	442	10%
5	Social Media	1.302	29%
6	Telematika	25	1%
7	TPT	2.006	45%
<b>TOTAL</b>		<b>4.490</b>	<b>100%</b>



Diklat SDM Industri Tahun 2024

Realisasi Diklat per Skema Tahun 2024

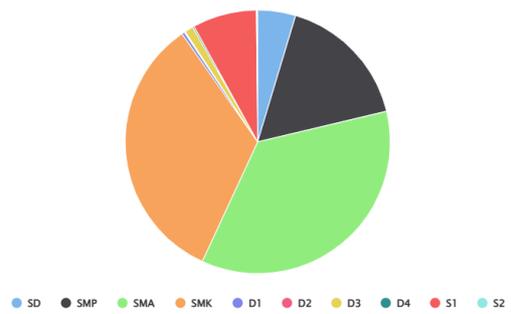
#	Kompetensi	Skema	Realisasi	%
1	Desain Kemasan	Desain Kemasan Produk Pangan	50	1%
2	Elektronika	Elektronika	75	2%
3	Elektronika	Operator Assembly & Solder	100	2%
4	Elektronika	Teknisi Perawatan AC	140	3%
5	Pengelasan	Plate Welder	350	8%
6	Produk Makanan dan Minuman	Operator Produksi Olahan Makanan dan Keamanan Pangan	442	10%
7	Social Media	Social Media Marketing	1.302	29%
8	Telematika	Fiber Optik	25	1%
9	TPT	Custom Made	100	2%
10	TPT	Operator Sewing	994	22%
11	TPT	Pembatik Tulis	887	20%
12	TPT	Teknisi-Garmen	25	1%
<b>TOTAL</b>			<b>4.490</b>	<b>100%</b>



Diklat SDM Industri Tahun 2024

Pendidikan Peserta Tahun 2024

#	Pendidikan	Realisasi	%
1	SD	208	5%
2	SMP	747	17%
3	SMA	1.599	36%
4	SMK	1.501	33%
5	D1	16	0%
6	D2	6	0%
7	D3	47	1%
8	D4	8	0%
9	S1	351	8%
10	S2	7	0%
<b>TOTAL</b>		<b>4.490</b>	<b>100%</b>



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman I Marpaung  
Jabatan : Direktur PT. Legasi Karya Indonesia  
Alamat : Jl Raya Pandugo VE A09 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa pada saat ini “Tenant IDFlex” Balai Diklat Industri Surabaya sedang dalam proses pendampingan pengurusan pendirian badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024



Lukman I Marpaung

Direktur PT. Legasi Karya Indonesia

**SURAT KETERANGAN**

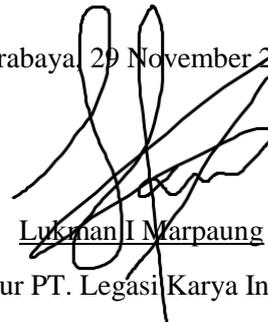
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman I Marpaung  
Jabatan : Direktur PT. Legasi Karya Indonesia  
Alamat : Jl Raya Pandugo VE A09 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa pada saat ini “Tenant Ride Refine” Balai Diklat Industri Surabaya sedang dalam proses pendampingan pengurusan pendirian badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024



Lukman I Marpaung

Direktur PT. Legasi Karya Indonesia



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman I Marpaung

Jabatan : Direktur PT. Legasi Karya Indonesia

Alamat : Jl Raya Pandugo VE A09 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa pada saat ini “Tenant Roborisa” Balai Diklat Industri Surabaya sedang dalam proses pendampingan pengurusan pendirian badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024

Lukman I Marpaung

Direktur PT. Legasi Karya Indonesia



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman I Marpaung

Jabatan : Direktur PT. Legasi Karya Indonesia

Alamat : Jl Raya Pandugo VE A09 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa pada saat ini “Tenant Superego” Balai Diklat Industri Surabaya sedang dalam proses pendampingan pengurusan pendirian badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024

Lukman I Marpaung

Direktur PT. Legasi Karya Indonesia



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman I Marpaung

Jabatan : Direktur PT. Legasi Karya Indonesia

Alamat : Jl Raya Pandugo VE A09 Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Dengan ini menerangkan bahwa pada saat ini “Tenant Voice Start Moto” Balai Diklat Industri Surabaya sedang dalam proses pendampingan pengurusan pendirian badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024

Lukman I Marpaung

Direktur PT. Legasi Karya Indonesia

NOTA DINAS

Nomor : 08 /BPSDMI.1/PR/I/2025

Yth. : Daftar Terlampir  
 Dari : Sekretaris BPSDMI  
 Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) BPSDMI Tahun 2024  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Tanggal : 06 Januari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 344/IJ-IND/PW/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemantauan P3DN melalui aplikasi e-monitoring APBN pada Intranet Kementerian Perindustrian tanggal 6 Januari 2025 diperoleh data **realisasi P3DN Tahun 2024** sebesar **83,20%**, sedangkan **target perjanjian tahun 2024** yang telah ditetapkan sebesar **85%**.

Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
BPSDMI	363.617.501.000	251.555.907.985	50.984.510.544	9.854.493.943	83,20%

Data realisasi pada e-monitoring APBN ini merupakan data realisasi belanja PDN, TKDN, dan impor yang mengacu pada 15 (lima belas) akun belanja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.

2. Rincian realisasi P3DN dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1	Sekretariat BPSDMI	29.162.118.000	24.742.623.964	193.567.622	0	85,51%
2	Pusdiklat	16.186.273.000	14.196.402.844	0	0	87,71%
3	PPPVI	47.640.495.000	1.209.444.148	45.688.570.762	506.932.336	98,44%
4	Pusbindiklat	17.246.530.000	14.104.355.389	0	0	81,78%
5	BDI Medan	7.305.028.000	4.951.243.112	0	0	67,78%
6	BDI Padang	10.143.285.000	7.535.212.546	0	0	74,29%
7	BDI Jakarta	14.600.660.000	14.181.093.361	277.300.000	43.131.000	99,03%
8	BDI Yogyakarta	13.551.269.000	13.450.396.302	0	0	99,26%
9	BDI Surabaya	13.873.762.000	13.269.650.035	0	0	95,65%
10	BDI Makassar	7.667.944.000	7.528.166.637	0	0	98,18%
11	BDI Denpasar	10.192.053.000	10.180.066.931	0	0	99,88%
12	STMI Jakarta	9.532.587.000	8.475.251.648	0	0	88,91%
13	STTT Bandung	7.380.440.000	7.271.404.290	0	0	98,52%
14	AKA Bogor*	0	0	0	0	0,00%
15	PTKI Medan	6.948.090.000	3.993.407.394	516.820.000	134.334.600	64,91%
16	ATI Padang	9.187.510.000	8.867.360.348	0	0	96,52%

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
17	ATK Yogyakarta	8.115.354.000	3.419.958.690	0	0	42,14%
18	APP Jakarta	5.303.719.000	5.024.129.376	0	37.820.007	94,73%
19	ATI Makassar	6.594.533.000	5.104.366.848	88.299.000	0	78,74%
20	SMAK Bogor	27.117.693.000	5.725.526.892	2.677.402.000	6.805.706.000	30,99%
21	SMAK Padang	7.740.954.000	5.207.502.661	436.666.000	1.544.000.000	72,91%
22	SMAK Makassar	4.720.836.000	4.454.838.371	0	0	94,37%
23	SMTI Banda Aceh	5.263.686.000	3.728.240.542	0	0	70,83%
24	SMTI Makassar	2.520.320.000	2.624.941.111	4.500.000	500.000	104,33%
25	SMTI Yogyakarta	6.234.966.000	5.790.571.567	65.500.000	0	93,92%
26	SMTI Bandar Lampung	5.306.908.000	3.501.105.445	240.400.000	239.800.000	70,50%
27	SMTI Padang	5.082.849.000	3.262.865.751	779.798.000	0	79,54%
28	SMTI Pontianak	5.027.419.000	1.236.404.183	0	0	24,59%
29	Akom Surakarta	4.070.991.000	3.262.225.017	15.687.160	0	80,52%
30	Politeknik Industri Logam Morowali	4.302.230.000	1.763.310.085	0	0	40,99%
31	PIFPK Kendal	5.880.752.000	5.778.708.062	0	0	98,26%
32	Akom Bantaeng	4.731.820.000	3.962.637.711	0	3.600.000	83,74%
33	Politeknik Industri Petrokimia Banten	34.984.427.000	33.752.496.724	0	538.670.000	96,48%

\*Politeknik AKA Bogor sebagai satuan kerja BLU tidak memiliki akun yang termasuk dalam 15 (lima belas) akun belanja yang telah ditetapkan

3. Menindaklanjuti hasil Monev Penggunaan PDN dan hasil FGD Monev Penggunaan PDN, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Unit kerja agar mendorong dan mempercepat penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
  - b. Pejabat pengadaan dan PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat memastikan nilai TKDN dari barang tersebut, dengan dibuktikan dari nomor sertifikat yang sesuai dengan produk dan terdaftar pada website TKDN Kementerian Perindustrian.
  - c. Admin keuangan setiap unit kerja agar lebih teliti dalam melakukan tagging produk pada emonitoring APBN dan pencatatan belanja produk ber TKDN agar dilengkapi dengan nomor sertifikat TKDN. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa agar dicantumkan pada kontrak pengadaan barang/jasa.
  - d. Mengoptimalkan pelaksanaan/realisasi belanja produk UMKK sesuai dengan komitmen/perencanaan belanja UMKK, dan melakukan tagging terhadap belanja produk UMKK pada e-katalog dan SPSE.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Sekretaris,

  
Jonni Afrizon

Tembusan:

Kepala BPSDMI.

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 08 /BPSDMI.1/PR/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

DAFTAR TERLAMPIR

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri;
2. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri;
3. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur;
4. Direktur Politeknik AKA Bogor;
5. Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
6. Direktur Politeknik Industri Logam Morowali;
7. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta;
8. Direktur Politeknik ATI Padang;
9. Direktur Politeknik ATI Makassar;
10. Direktur Politeknik STTT Bandung;
11. Direktur Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu Kendal;
12. Direktur Politeknik STMI Jakarta;
13. Direktur Politeknik APP Jakarta;
14. Direktur Akom Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
15. Direktur Akom Industri Manufaktur Bantaeng;
16. Direktur Politeknik Petrokimia Banten;
17. Kepala BDI Yogyakarta;
18. Kepala BDI Medan;
19. Kepala BDI Makassar;
20. Kepala BDI Denpasar;
21. Kepala BDI Padang;
22. Kepala BDI Surabaya;
23. Kepala BDI Jakarta;
24. Kepala SMK SMTI Padang;
25. Kepala SMK SMTI Bandar Lampung;
26. Kepala SMK SMTI Pontianak;
27. Kepala SMK SMTI Banda Aceh;
28. Kepala SMK SMTI Yogyakarta;
29. Kepala SMK SMTI Makassar;
30. Kepala SMK SMAK Padang;
31. Kepala SMK SMAK Bogor; dan
32. Kepala SMK SMAK Makassar.

Sekretaris,

  
Jonhi Afrizon



Nomor : B/1064/SJ-IND.3/KU/VII/2024  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Laporan  
Keuangan Tingkat Satker dan Unit  
Eselon I TA 2023

Jakarta, 22 Juli 2024

Yth.  
(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja dan Eselon I TA 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan Hasil Penilaian Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja dan Eselon I TA 2023.

Kami harapkan hasil penilaian ini dapat mendorong Unit Akuntansi di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan dapat informatif bagi pemangku kepentingan di seluruh jenjang pelaporan serta mendukung tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan

Abdulah

Tembusan :  
Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Surat : Penyampaian Hasil Penilaian  
Laporan Keuangan Tingkat  
Satker dan Unit Eselon I TA 2023  
Nomor : B/1404/SJ-IND.3/KU/VI/2024  
Tanggal : 22 Juli 2024

#### DAFTAR PENERIMA:

1. Sekretaris Ditjen IKFT;
2. Sekretaris Ditjen ILMATE;
3. Sekretaris Ditjen KPAlI;
4. Sekretaris Ditjen IKMA;
5. Sekretaris Ditjen IA;
6. Sekretaris BSKJI;
7. Sekretaris BPSDMI;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Kepala Pusat Data dan Informasi;
10. Kepala Pusat P3DN;
11. Kepala Pusat PIH;
12. Direktur Politeknik STMI Jakarta;
13. Direktur Politeknik APP Jakarta;
14. Direktur Politeknik STTT Bandung;
15. Direktur Politeknik AKA Bogor;
16. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta;
17. Direktur Politeknik ATI Makassar;
18. Direktur Politeknik PTKI Medan;
19. Direktur Politeknik ATI Padang;
20. Direktur Politeknik Industri Logam Morowali;
21. Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal;
22. Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten;
23. Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
24. Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
25. Kepala SMK-SMAK Bogor;
26. Kepala SMK-SMAK Padang;
27. Kepala SMK-SMAK Makassar
28. Kepala SMK-SMTI Yogyakarta;
29. Kepala SMK-SMTI Makassar;
30. Kepala SMK-SMTI Banda Aceh;
31. Kepala SMK-SMTI Padang;
32. Kepala SMK-SMTI Bandar Lampung;
33. Kepala SMK-SMTI Pontianak;
34. Kepala BDI Jakarta;
35. Kepala BDI Yogyakarta;
36. Kepala BDI Surabaya;
37. Kepala BDI Medan;
38. Kepala BDI Padang;
39. Kepala BDI Makassar;
40. Kepala BDI Denpasar;
41. Kepala BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
42. Kepala BBSPJI Agro;
43. Kepala BBSPJI Selulosa;
44. Kepala BBSPJI Tekstil;

45. Kepala BBSPJI Logam dan Mesin;
46. Kepala BBSPJI Keramik dan Mineral Non-logam;
47. Kepala BBSPJI Bahan dan Barang Teknik;
48. Kepala BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik;
49. Kepala BBSPJI Kerajinan dan Batik;
50. Kepala BBSPJ Pencegahan Pencemaran Industri;
51. Kepala BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
52. Kepala BSPJI Surabaya;
53. Kepala BSPJI Banda Aceh;
54. Kepala BSPJI Medan;
55. Kepala BSPJI Padang;
56. Kepala BSPJI Palembang;
57. Kepala BSPJI Lampung;
58. Kepala BSPJI Pontianak;
59. Kepala BSPJI Banjarbaru;
60. Kepala BSPJI Samarinda;
61. Kepala BSPJI Manado;
62. Kepala BSPJI Ambon;
63. Kepala BSPJI Jakarta;
64. Kepala BSPJI Pekanbaru;
65. Kepala BPIPI Sidoarjo;

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Lampiran II Surat: Penyampaian Hasil Penilaian  
Laporan Keuangan Tingkat  
Satker dan Unit Eselon I TA 2023  
Nomor : B/004/SJ-IND.3/KU/VII/2024  
Tanggal : 22 Juli 2024

**NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2023  
TINGKAT SATUAN KERJA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>NILAI</b>
1	BBSPJ PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	99.90
2	BSPJI MANADO	99.90
3	BBSPJI KULIT KARET DAN PLASTIK	99.00
4	BBSPJI KERAMIK & MINERAL NON LOGAM	99.00
5	BSPJI PEKANBARU	99.00
6	SMK SMAK PADANG	98.75
7	BSPJI AMBON	98.75
8	BSPJI MEDAN	98.50
9	SMK SMTI PADANG	98.50
10	BDI SURABAYA	98.50
11	BSPJI PALEMBANG	98.00
12	BSPJI PADANG	98.00
13	AKOM BANTAENG	98.00
14	BSPJI BANJARBARU	98.00
15	BDI YOGYAKARTA	98.00
16	BDI JAKARTA	98.00
17	POLITEKNIK STMI JAKARTA	97.85
18	PUSAT PIH	97.75
19	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	97.50
20	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	97.15
21	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL;	97.00
22	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM	97.00
23	BSPJI BANDA ACEH	96.90
24	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	96.50
25	SMK SMAK BOGOR	96.25
26	BSPJI PONTIANAK	96.00
27	BBSPJI AGRO	95.75
28	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	95.50
29	POLITEKNIK PTKI MEDAN	95.25
30	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	95.00

NO.	NAMA SATKER	NILAI
31	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95.00
32	POLITEKNIK APP JAKARTA	95.00
33	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	94.90
34	BDI DENPASAR	94.90
35	BBSPJI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	93.75
36	SMK SMTI YOGYAKARTA	93.55
37	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93.50
38	BBSPJI SELULOSA	93.40
39	BDI MEDAN	92.45
40	BDI MAKASSAR	92.25
41	BSPJI SURABAYA	92.25
42	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	91.05
43	BSPJI SAMARINDA	90.85
44	BPIPI SIDOARJO	90.05
45	PUSDATIN	89.20
46	POLITEKNIK ATI PADANG	88.80
47	SMK SMAK MAKASSAR	88.40
48	BBSPJI TEKSTIL	88.25
49	P3DN	87.55
50	SMK SMTI BANDA ACEH	87.05
51	POLITEKNIK STTT BANDUNG	87.00
52	POLITEKNIK AKA BOGOR	86.75
53	BDI PADANG	85.80
54	SMK SMTI MAKASSAR	84.25
55	SMK SMTI PONTIANAK	80.95
56	BSPJI JAKARTA	80.45
57	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	78.05

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Lampiran III Surat: Penyampaian Hasil Penilaian  
Laporan Keuangan Tingkat  
Satker dan Unit Eselon I TA  
2023

Nomor : B/1004/SJ-IND.3/KU/VII/2024  
Tanggal : 22 Juli 2024

**NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2023  
TINGKAT ESELON I**

No.	Eselon 1	Nilai
1	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	97.90
2	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	95.90
3	INSPEKTORAT JENDERAL	94.75
4	SEKRETARIAT JENDERAL	94.00
5	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	93.00
6	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	92.90
7	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	91.75
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	91.65
9	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	90.50

Kepala Biro Keuangan



Abdulah



**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BDI SURABAYA**

NOMOR : 8 IJ-IND.2/LHEV/2024  
TANGGAL : 22 MEI 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
2024**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada BDI Surabaya dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. BDI Surabaya memperoleh nilai sebesar 78,30 atau BB dengan interpretasi Sangat Baik.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di BDI Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

- |  |         |
|--|---------|
| a. Perencanaan Kinerja                     | : 24,30 |
| b. Pengukuran Kinerja                      | : 24,00 |
| c. Pelaporan Kinerja                       | : 12,00 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | : 18,00 |

Berdasarkan hasil evaluasi, kami rekomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu/ evaluasi Renstra terutama untuk penyusunan Renstra berikutnya yang berfokus pada Indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART terutama pada Indikator Kinerja Lulusan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi, dan target yang belum menantang terutama pada Indikator Kinerja Inkubator Industri yang Tumbuh.
2. Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) secara berkala/triwulanan, baik yang sudah ada maupun aplikasi termutakhir.
3. Melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di satuan kerja lain level internal/ nasional/ internasional (*Benchmark* Kinerja) pada LAKIP.
4. Membuat perhitungan efisiensi secara memadai pada setiap indikator kinerja pada setiap tahun agar hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas, efisiensi, perbaikan, dan peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta mengupayakan adanya inovasi (rekomendasi tambahan) sehingga ada upaya yang dihargai dalam meningkatkan nilai SAKIP.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian No.52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 472/IJ-IND/ST/4/2024 tanggal 24 April 2024.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk

berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

- penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
  5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya (menjadi satu di komponen 1 s.d. 4).

#### E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik nonparametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

1. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
2. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi

terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;

3. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. evaluasi AKIP sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

#### F. Gambaran Umum BDI Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 17 Februari Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri (BDI) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI). Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) industri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Balai Diklat Industri Surabaya mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;
5. Pelaksanaan indentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP BDI Surabaya

Pada Evaluasi tahun sebelumnya, BDI Surabaya mendapatkan nilai 77,15 kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, BDI Surabaya telah direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan Renstra khususnya terhadap Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan berorientasi *outcome* (yaitu pada Indikator Kinerja Inkubator Bisnis) dan target yang tidak meningkat (yaitu pada mitra industri kerjasama pelatihan vokasi) serta mengendalikan keselarasan keseluruhan dokumen perencanaan kinerja.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala baik secara mandiri maupun berjenjang, menjelaskan efisiensi penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategik, dan selalu mendokumentasi aktifitas yang dilakukan.
3. Menetapkan/menyempurnakan pedoman penyusunan LAKIP (sesuai dengan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu dengan menambahkan penjelasan terkait efisiensi sumber daya untuk meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta menjamin kevalidan data capaian kinerja atas seluruh kriteria penilaian evaluasi AKIP dan memanfaatkan hasil LAKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja (strategi/ kebijakan/ anggaran) tahun berikutnya.

#### H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Melakukan penyempurnaan Renstra khususnya terhadap Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan berorientasi <i>outcome</i> (yaitu pada Indikator Kinerja Inkubator Bisnis) dan target yang tidak meningkat (yaitu pada mitra industri kerjasama pelatihan vokasi) serta mengendalikan keselarasan keseluruhan dokumen perencanaan kinerja	- Penyempurnaan Renstra terhadap Indikator Kinerja Inkubator Bisnis yang belum memenuhi kriteria SMART dan berorientasi <i>outcome</i> sudah dilakukan BDI Surabaya dengan melakukan koordinasi dengan BPSDMI agar indikator kinerja Inkubator Bisnis bisa direvisi agar memenuhi kriteria SMART. Penjelasan indikator kinerja diuraikan lebih lanjut dalam reviu renstra yang dituangkan dalam notulensi. Selain itu, disampaikan kepada Tim Inkubator Bisnis agar	Sudah Ditindak lanjuti

		<p>dalam pelaksanaannya dapat berpedoman pada Permenkop dan UKM Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Mitra Industri yang bekerjasama dengan BDI Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 88 mitra, dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 164 mitra, turun hampir 50%. Hal ini dapat dijelaskan karena di tahun 2022, diklat jointer cukup banyak dan penempatan tersebar lebih luas, sedangkan di tahun 2023 pelaksanaan diklat jointernya tidak banyak penempatan sehingga mempengaruhi jumlah mitra yang bekerjasama dengan BDI, namun dari segi jumlah skema diklat yang dilaksanakan pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022.</li> <li>- Dalam rangka mengendalikan keselarasan keseluruhan dokumen perencanaan kinerja BDI Surabaya, juga telah ditetapkan mekanisme berupa SOP Monev Dokumen Perencanaan Kinerja.</li> </ul>	
2	<p>Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala baik secara mandiri maupun berjenjang, menjelaskan efisiensi penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategik, dan selalu mendokumentasi aktifitas yang dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BDI Surabaya telah melakukan evaluasi berkala secara mandiri maupun berjenjang dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala, monitoring kegiatan melalui ALKI, aplikasi SIDIA.</li> <li>- Terkait penjelasan efisiensi penggunaan anggaran, telah dilaksanakan oleh BDI Surabaya melalui rapat koordinasi secara berkala.</li> </ul>	<p>Sudah Ditindak lanjuti</p>

		- Dokumentasi aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh BDI Surabaya disimpan di cloud internal BDI Surabaya.	
3	Menetapkan/menyempurnakan pedoman penyusunan LAKIP (sesuai dengan Permenpan RB no 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu dengan menambahkan penjelasan terkait efisiensi sumber daya untuk meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta menjamin kevalidan data capaian kinerja atas seluruh kriteria penilaian evaluasi AKIP dan memanfaatkan hasil LAKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja (strategi/kebijakan/anggaran) tahun berikutnya	BDI Surabaya telah melakukan upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan kualitas LAKIP dengan menambahkan penjelasan terkait efisiensi sumber daya untuk meningkatkan pemenuhan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta menjamin kevalidan data capaian kinerja atas seluruh kriteria penilaian evaluasi AKIP dan memanfaatkan hasil LAKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja (strategi/kebijakan/anggaran).	Sudah Ditindaklanjuti

## BAB II HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 24,30 dari 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>24,30</b>
1a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00
1b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30
1c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00

BDI Surabaya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2023, Rencana Kinerja 2023, KAK 2021-2023, POK 2021-2023, dan RAB 2023, serta telah melengkapi dokumen untuk 5 tahun terakhir. Perencanaan Kinerja juga telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dalam dokumen Perencanaan Kinerja terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, yaitu Lulusan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi;
- b. Dalam dokumen Perencanaan Kinerja terdapat indikator kinerja yang belum memiliki target yang menantang, yaitu Inkubator Industri yang Tumbuh.

## 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 24,00 dari 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>2</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>
2a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,80
2b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20
2c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00

Pengukuran Kinerja dievaluasi dengan menggunakan data-data kinerja yang ada dan evaluasi rutin triwulanan, baik dengan menggunakan Laporan PP39, rapat rutin dan notulennya, dan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian dalam mencapai kinerja. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut.

- a. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yakni Intranew yang telah dimanfaatkan untuk monev Perkin namun nilai hasil pengukuran belum dapat ditampilkan di dalam Intranew.
- b. Dibutuhkan beberapa upaya lebih yang dapat meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran capaian kinerja.

## 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 12,00 dari 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
3a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40
3b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60
3c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00

Dokumen Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja antara lain telah disusun secara berkala, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu. Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Selain itu, Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam mencapai kinerja berikutnya. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. BDI Surabaya telah menyusun, mempublikasikan, dan menyampaikan LAKIP dengan tepat waktu secara berkala namun masih terdapat beberapa LAKIP yang belum diformalkan untuk pemenuhan nilai SAKIP 5 tahun.
- b. BDI Surabaya telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level internal dengan membandingkan capaian kinerja BDI lain di lingkungan Kementerian Perindustrian (Benchmark Kinerja), namun masih perlu untuk diperbaiki kedepannya dengan level nasional.

#### 4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 18,00 dari 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00

4a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00
4b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. Rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Penilaian untuk Sub Komponen 4a dan 4b disepakati nilai yang sama untuk penilaian Inspektorat Jenderal. Catatan terutama berada pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum terdapat pedoman Teknis dan belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- b. Catatan efisiensi yang terdapat pada LAKIP belum dapat dibandingkan dengan capaian efisiensi tahun lalu sehingga belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pada kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, BDI Surabaya direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu/ evaluasi Renstra terutama untuk penyusunan Renstra berikutnya yang berfokus pada Indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART terutama pada Indikator Kinerja Lulusan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi, dan target yang belum menantang terutama pada Indikator Kinerja Inkubator Industri yang Tumbuh.

2. Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) secara berkala/triwulanan, baik yang sudah ada maupun aplikasi termutakhir.
3. Melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di satuan kerja lain level internal/ nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) pada LAKIP.
4. Membuat perhitungan efisiensi secara memadai pada setiap indikator kinerja pada setiap tahun agar hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas, efisiensi, perbaikan, dan peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta mengupayakan adanya inovasi (rekomendasi tambahan) sehingga ada upaya yang dihargai dalam meningkatkan nilai SAKIP.

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi AKIP, BDI Surabaya memperoleh nilai total sebesar 78,30 atau BB dengan rincian per komponen sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja : 24,30
- b. Pengukuran Kinerja : 24,00
- c. Pelaporan Kinerja : 12,00
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 18,00

Hal ini berarti Evaluasi AKIP BDI Surabaya Sangat Baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level koordinator.

#### B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Terima kasih atas kerjasama dan respon yang baik dari BDI Surabaya. Hasil dari Evaluasi AKIP diharapkan mampu untuk meningkatkan implementasi SAKIP yang lebih baik kedepannya dan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan.

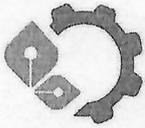
Inspektur I



Bayu Fajar Nugroho

## LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Evaluasi
2. Surat Tugas



**SURAT TUGAS**

No. 472/IJ-IND/ST/4/2024

Inspektur I menugaskan kepada:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Afrizal Haris                  | (Pengendali Teknis) |
| 2. Hariadi Amri                   | (Pengendali Teknis) |
| 3. Kesumaning Hastuti             | (Ketua Tim)         |
| 4. Mohammad Adhi Rachmaidi        | (Ketua Tim)         |
| 5. Rachmat Muhibianto             | (Ketua Tim)         |
| 6. Rizki Aviandri                 | (Ketua Tim)         |
| 7. Mokhammad Subuh Washardito     | (Ketua Tim)         |
| 8. Arantxa Tiar                   | (Anggota)           |
| 9. Noer Kristia Lestari Sitepu    | (Anggota)           |
| 10. Hary Apriyandi Mulia Romadhon | (Anggota)           |
| 11. Dinavita Rizkyanti            | (Anggota)           |
| 12. Aditya Gamma Mesakh S         | (Anggota)           |
| 13. Noer Dwi Rizkia Putri         | (Anggota)           |
| 14. Yon Handika Siregar           | (Anggota)           |

Tujuan : Tangerang  
Keperluan : Evaluasi SAKIP Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan BPSDMI TA 2023  
Lama Tugas : 3 (tiga) hari (24 - 26 April 2024)

Sekembalinya segera menyampaikan laporan kepada Inspektur I sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2024



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. KPPN Jakarta VII;
3. Bendahara Pengeluaran Itjen;
4. Yang Bersangkutan.

Komponen/Sub Komponen/Kriteria					Bobot		Unit/Satker		Nilai	Catatan Evaluasi	Guidance
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria		Bobot	Jawaban	Nilai	Unit/Satker	Nilai				
1	PERENCANAAN KINERJA		30,00	24,3				jika ya = v, tidak = x, warna merah jangan diisi			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		6,00	AA	6		100%				
Kriteria:											
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.							v			Dinilai ya, menggunakan pedoman permenperin 150/2011
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.										Dikeluarkan dari penilaian
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.							v			Renstra
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.							v			Renkin (bisa dilihat dari dari aplikasi sakti)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.							v			KAK per kegiatan, gelondongan tidak bisa (bisa dilihat dari dari aplikasi sakti)
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.							v			POK/RAB rinci (bisa dilihat dari dari aplikasi sakti)
7	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.							v			Perkin sakti
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)		9,00	8	6,3			82%			
Kriteria:											
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.							v			semua dokumen ditandatangani oleh kepala satker
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.							v			Nota dinas pengiriman ke Biro Perencanaan/Eselon I semua dokumen renkin dan perkin (minta edaran ke rocana, jika tidak lihat dipermenperin 150/2011) serta bukti publikasi pada website, 31 Januari 2024
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.										adaanya Tujuan dan IK, sasaran dan IK, IKU dan target kinerja
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.							v			Tujuan/Sasaran/IKU berorientasi minimal output penting (bukan dokumen, layanan, kegiatan)
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.							x			Semua Indikator Kinerja
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).							v			Redaksi Indikator Kinerja

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot		Unit/Satker	Nilai	Catatan Evaluasi	Guidance
		Jawaban	Nilai				
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realists.					<p>- IK Inkubator industri yang tumbuh memiliki target 1 pada tahun 2023-2024</p> <p>Berdasarkan konfirmasi, IK di atas baru ada di tahun 2023</p> <p>Berdasarkan konfirmasi, target tetap namun anggaran menurun dapat disebut IK tersebut menantang</p> <p>Catatan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IK Mitra Industri kerjasama pelatihan vokasi</li> <li>- Industri berbasis kompetensi memiliki target 3 perusahaan dari tahun 2021 - 2024</li> <li>- Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) memiliki target 4 pada tahun 2023 - 2024 (Note : IK tidak masuk dalam perkin)</li> </ul>	Menantang : ada peningkatan target (target tetap anggaran turun) Realists : kesesuaian dengan ketersediaan anggaran Untuk kinerja yang terkait dengan anggaran bisa dipenuhi min. 2/3
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				oke	Penilaian Tahun 2023 Sampling SKP masing-masing satu orang jabatan fungsional Jika ada yg tidak selaras satu maka dianggap tidak terpenuhi Bonus. Kertas Kerja Crosscutting (menggambarkan koordinasi lusi antar bidang)	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				oke		
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				oke		1a7 Ok , kriteria ini oke, diselaraskan dengan BPSDMI (Renkin dan perkin)
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				oke		Perkin individu dan dicek juga harus selaras dengan renkin satter
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	88	12	100%		
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				v	Matriks keterkaitan kinerja, kegiatan, dan anggaran telah dilampirkan	Semua Indikator Kinerja telah teranggarkan (Renkin ik Stakeholder dan probis) Minta matriks keterkaitan kinerja, kegiatan dan anggaran
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				v	Matriks keterkaitan kinerja, kegiatan, dan anggaran telah dilampirkan	Minta matriks keterkaitan kinerja, kegiatan dan anggaran
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				v	notulen rapat reviu renstra telah dilampirkan	Membandingkan target tahun lalu dengan yg dinilai sekarang. Kriteria terpenuhi jika target tercapai, jika target tahun lalu (2023) tidak tercapai harus diakumulasikan di target 2024 (bukti adanya revisi renstra)
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				v	Notulen rapat monitoring rencana aksi tiap trivulan telah dilampirkan	PP39 dan rencana aksi, kalau ada perubahan kegiatan disesuaikan (dibuktikan notulen monitoring rencana aksi)
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				v	notulen rapat reviu renstra telah dilampirkan	Tindak lanjut evaluasi saking sebelumnya terkait dokumen perencanaan kinerja (dibuktikan dengan notulen reviu renstra)
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				v	Notulen rapat reviu renstra telah dilampirkan	Catatan no 5, jika ada perbaikan lain secara internal, jika tidak ada perbaikan harus dibuktikan dengan hasil reviu bahwa dokumen perencanaan kinerja masih relevan sehingga tidak perlu ada perbaikan (dibuktikan dengan notulen reviu dokumen perencanaan)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Nilai	Catatan Evaluasi	Guidance
			Jawaban	Nilai			
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				v	oke	SKP merupakan cascading dari target kinerja pimpinan
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				v	Hasil evaluasi kinerja pegawai tahunan 2023 telah dilampirkan	Penilaian SKP predikat baik
2	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30,00		24			
2.a	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	5,00	BB	4,8			Bonus. Pedoman PP No. 39 th 2006
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				v		Lampiran pedoman kinerja pada Renstra
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				v	SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja (dibuat 1 April 2021 dan efektif 4 Juli 2023)	SOP Pengumpulan Data Kinerja
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				v		
2.b	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	9,00	BB	7,2	100%		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				v	Notulen rapat money rencana aksi dan rapat penyusunan LAKIP telah dilampirkan	Daftar hadir dan Notulensi Rapat Money rencana aksi dan penyusunan lakip (pimpinan hadir dalam rapat)
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				v	Form pengumpulan data kinerja yang divalidasi dan dilampirkan	bukti dukung pengumpulan Form data kinerja (cek SOP) sudah di divalidasi dan divalidasi
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				v	Form pengumpulan data kinerja yang divalidasi dan dilampirkan	bukti dukung pengumpulan Form data kinerja (cek SOP) sudah di divalidasi dan divalidasi
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				v	oke	PP39
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				v	oke	Bonus
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				v	oke	Pakai ALKI di intranet
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				v	Screenshot money perkin di intranet telah dilampirkan namun nilai trivulanan tidak tampil di tabel	Pakai money capaian kinerja di intranet
2.c	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	15,00	BB	12	100%		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pembelian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				v	ke depannya agar diperbaiki	dinilai Ya. Tahun lalu masih menggunakan Rekap absensi
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.						Dikeluarkan dari penilaian
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Refocusing) Organisasi.				v	oke	Dikeluarkan dari penilaian
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja.				v	oke	Notulensi evaluasi rencana aksi (PP39) terkait penyusunan strategi (merencanakan untuk mencapai tujuan), membandingkan rencana aksi per trivulan
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja.				v	oke	Notulensi evaluasi rencana aksi (PP39) terkait penyusunan kebijakan (arahan pimpinan satker), membandingkan rencana aksi per trivulan
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Aktivitas dalam mencapai kinerja.				v	oke	Notulensi evaluasi rencana aksi (PP39) terkait penyusunan aktivitas, membandingkan rencana aksi per trivulan
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja.				v	oke	Notulensi evaluasi rencana aksi (PP39) terkait penyusunan anggaran, membandingkan rencana aksi per trivulan
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				v	oke	menghitung efisiensi pada ik yang sudah realisasi fisik 100%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Nilai	Catatan-Evaluasi	Guidance
			Jawaban	Nilai			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				V	oke	Rapat PP39 membahas capaian kinerja per triwulan (dibuktikan dengan notulen rapat)
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				V	Hasil evaluasi kinerja pegawai tahunan 2023 telah dilampirkan	Penilaian SKP predikat Baik
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15,00		12	Jika ya = v, tidak = x, warna merah jangan diisi		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,4	100%		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				V	LAKIP 2019-2023 ada di website BDI Surabaya	Lakip 5 Tahun terakhir
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				V	LAKIP 2019-2023 ada di website BDI Surabaya	Lakip 5 Tahun terakhir
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				V	LAKIP 2019-2023 ada di website BDI Surabaya, namun LAKIP 2019 dan 2021 belum distempel	Lakip 5 Tahun terakhir di tandatangan pimpinan satker
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.				V	Bukti revidi LAKIP telah dilampirkan	Bukti Revidi Lakip 5 Tahun terakhir
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				V	LAKIP 2019-2023 ada di website BDI Surabaya	Diupload di website
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				V	Nota Dinas penyampaian LAKIP telah dilampirkan	Eselon II 10 februari 2024, UPT 31 Januari 2024
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4,50	BB	3,6	100%		AA jika satker masuk sinovik top 99
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				V	oke	Standar Permenpan 53/2014 (format)
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				V	oke	cek LAKIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				V	oke	cek LAKIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				V	oke	Dibandingkan dengan target Renstra
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				V	oke	cek LAKIP
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				V	ada untuk satker bdi lain	dibandingkan dengan KL lain untuk lk yang bisa dibandingkan (IPASN dengan BKN, nilai SAKIP, Nilai LK)
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				V	oke	cek LAKIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				V	oke	Diungkapkan efisiensi per setiap kinerja (boleh anggaran, sdm, dsb)
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penguatan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				V	oke	Rekomendasi pada LAKIP
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6	100%		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				V	Notulen rapat penyusunan LAKIP telah dilampirkan	Dalam notulensi penyusunan LAKIP ada masukan dari pimpinan satker atau tandatangan kepala satker
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				V	Notulen rapat penyusunan LAKIP dan daftar hadirnya telah dilampirkan	Daftar hadir rapat penyusunan LAKIP seluruh pegawai (PNS saja)
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.				V	oke	LAKIP digunakan untuk penyusunan program kegiatan tahun berikutnya (cek dari rekomendasi LAKIP 2023)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Nilai	Catatan Evaluasi	Guidance
			Jawaban	Nilai			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan anggaran penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				v	oke	LAKIP digunakan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya (cek dari rekomendasi LAKIP 2023)
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				v	oke	LAKIP digunakan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja tahun berikutnya (cek dari rekomendasi LAKIP 2023)
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				v	oke	LAKIP digunakan untuk penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya (cek dari rekomendasi LAKIP 2023)
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				v		bonus
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	25,00	18				
4.a	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	5,00	BB	4			
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				v		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				v		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				v		
4.b	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	7,50	B	5,25	80%		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				v		
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				v		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				v		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				v		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				x		
4.c	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	12,50	B	8,75	80%		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				v		Bukti tindak lanjut rekomendasi LHE telah dilampirkan
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				v		Bukti tindak lanjut rekomendasi LHE telah dilampirkan
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				v		Peningkatan nilai SAKIP tahun sebelumnya dengan tahun ini (asumsi kriteria ini ya)
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				x		membandingkan capaian kinerja dan catatan efisiensi LAKIP tahun 2022 dan 2023
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				v		peningkatan persentase capaian kinerja pada LAKIP 2022 dan 2023
			<b>NILAI SAKIP</b>				
			<b>78,30</b>				
			<b>Nilai SAKIP tahun lalu =</b>				
			<b>77,15</b>				

## NOTA DINAS

NOMOR 146 /SJ-IND.2/KP/II/2025

Yth. : (terlampir)  
Dari : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Hal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023  
di Lingkungan Kementerian Perindustrian  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehubungan dengan pengukuran kinerja tahun 2024 untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. IPASN merupakan nilai indeks atas kondisi tahun sebelumnya, artinya nilai IPASN pada tahun 2024 menggambarkan kondisi pada tahun 2023.
2. Terlampir capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2023 untuk dijadikan capaian kinerja tahun 2024 masing-masing unit kerja.
3. Data detail dimensi IPASN setiap pegawainya dapat dilihat pada intranet (Aplikasi Kinerja Pegawai > Rekap IPASN) dan aplikasi MyASN.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia,



Feby Setyo Haryono

Lampiran 1 Surat Dinas Kepala Biro  
Organisasi dan Sumber  
Daya Manusia

Nomor : 146 /SJ-IND.2/KP/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  3. Sekretaris BSKJI;
  4. Sekretaris BPSDMI;
  5. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
  6. Para Kepala BBSPJI;
  7. Para Kepala BSPJI;
  8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
  9. Para Pimpinan Unit Pendidikan dan;
  10. Kepala BPIPI Sidoarjo;
  11. Kepala BPIFK Denpasar.
- di lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia,



Feby Setyo Haryono

Lampiran 2 Surat Dinas Kepala Biro  
Organisasi dan SDM

Nomor : 146 /SJ-IND.2/KP/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

**Rata-Rata Nilai IP ASN Unit Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Biro Perencanaan	37	23,24	27,38	25,00	5	80,62
2	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	38	22,63	32,93	26,84	5	87,40
3	Biro Keuangan	38	23,29	25,79	25,13	5	79,21
4	Biro Hukum	37	22,70	27,94	24,32	5	79,97
5	Biro Hubungan Masyarakat	31	23,23	32,60	29,52	5	90,35
6	Biro Umum	72	22,22	23,41	25,14	5	75,77
7	Pusat Data dan Informasi	35	22,29	29,55	24,29	5	81,12
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	27	22,96	26,31	25,93	5	80,20
9	Pusat Pemberdayaan Industri Halal	21	24,29	22,98	21,67	5	73,93
10	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	40	23,00	30,94	27,63	5	86,56
11	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	27	24,44	25,15	25,56	5	80,15
12	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	23	23,91	26,74	28,70	5	84,35
13	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	23	24,13	25,30	25,00	5	79,43
14	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	32	21,41	27,95	27,97	5	82,32
15	Direktorat Industri Kimia Hulu	31	24,68	29,08	25,65	5	84,40
16	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	38	24,21	23,68	24,47	4,89	77,26
17	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	31	24,35	31,80	26,45	5	87,61
18	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	29	23,79	20,34	21,90	5	71,03
19	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	46	23,37	27,23	28,15	5	83,75
20	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	37	23,92	27,78	29,46	5	86,16

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
21	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	35	24,71	24,29	25,57	5	79,57
22	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	31	24,52	22,26	24,84	5	76,61
23	Direktorat Industri Logam	31	24,52	24,27	27,10	5	80,89
24	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	45	22,11	27,52	26,44	5	81,08
25	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	28	22,68	27,96	26,43	5	82,07
26	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	26	23,27	24,29	24,62	5	77,17
27	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	24	23,33	26,83	25,42	5	80,58
28	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	32	22,03	29,71	25,00	5	81,74
29	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	40	22,75	28,85	26,13	5	82,73
30	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	38	24,21	26,78	25,79	5	81,78
31	Direktorat Perwilayahan Industri	28	24,82	25,36	26,07	5	81,25
32	Direktorat Akses Industri Internasional	30	23,50	20,32	24,50	5	73,32
33	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	23	24,57	27,39	28,91	5	85,87
34	Sekretariat Inspektorat Jenderal	29	23,45	30,21	25,17	5	83,83
35	Inspektorat I	17	22,35	32,53	27,65	5	87,53
36	Inspektorat II	16	22,81	29,64	25,00	5	82,45
37	Inspektorat III	18	21,94	30,83	23,33	5	81,11
38	Inspektorat IV	18	23,06	31,49	25,00	5	84,54
39	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	46	22,83	30,67	24,78	5	83,28
40	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	25	24,60	23,80	26,40	5	79,80
41	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	30	23,50	25,18	25,00	5	78,68
42	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	27	22,59	25,90	25,74	5	79,23
43	Pusat Industri Hijau	19	23,68	26,09	25,00	5	79,78
44	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	103	23,11	31,87	23,98	5	83,95

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
45	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	118	22,37	26,17	23,05	5	76,59
46	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	73	23,49	32,96	25,89	5	87,34
47	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	82	22,13	28,36	23,29	5	78,79
48	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	111	22,61	27,34	22,79	5	77,75
49	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	94	23,14	32,21	24,73	5	85,08
50	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	120	22,17	33,42	26,13	5	86,71
51	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	104	23,37	30,71	24,66	5	83,74
52	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	102	22,55	33,26	25,00	5	85,81
53	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	104	22,69	25,56	24,76	5	78,01
54	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	75	22,93	35,40	26,53	5	89,87
55	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	53	23,21	31,30	25,38	5	84,88
56	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	62	22,18	29,80	25,00	5	81,98
57	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	53	22,92	31,30	24,25	5	83,47
58	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	58	23,53	31,97	24,14	5	84,64
59	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	49	22,35	24,76	24,49	5	76,59
60	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	71	22,75	34,08	25,07	5	86,90
61	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	69	21,96	33,55	25,00	5	85,51
62	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	46	21,52	31,85	25,00	5	83,37
63	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	51	23,33	29,64	25,00	5	82,97
64	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	53	23,02	32,68	25,00	5	85,69

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
65	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	41	22,32	24,49	25,00	5	76,80
66	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	37	23,51	27,38	26,76	5	82,65
67	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	27	22,59	31,28	25,00	5	83,87
68	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	34	22,35	22,79	25,29	5	75,44
69	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	26	23,65	22,38	25,00	5	76,04
70	Balai Diklat Industri Medan	28	21,79	32,05	25,00	5	83,84
71	Balai Diklat Industri Padang	25	21,60	31,20	25,20	5	83,00
72	Balai Diklat Industri Jakarta	27	22,22	28,30	25,19	5	80,70
73	Balai Diklat Industri Yogyakarta	29	22,41	35,64	27,24	5	90,30
74	Balai Diklat Industri Surabaya	32	22,50	31,33	25,00	5	83,83
75	Balai Diklat Industri Makassar	28	22,86	30,24	25,00	5	83,10
76	Balai Diklat Industri Denpasar	29	22,41	31,38	26,38	5	85,17
77	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	23	24,13	26,26	25,22	5	80,61
78	Politeknik STMI Jakarta	87	21,15	29,75	24,71	5	80,61
79	Politeknik STTT Bandung	112	21,12	25,85	24,55	5	76,52
80	Politeknik AKA Bogor	115	21,00	22,29	24,74	5	73,03
81	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	102	21,03	22,23	24,85	5	73,11
82	Politeknik ATI Padang	107	21,54	28,43	24,77	5	79,74
83	Politeknik ATK Yogyakarta	110	20,95	31,17	27,14	5	84,26
84	Politeknik APP Jakarta	86	21,16	31,98	24,71	5	82,85
85	Politeknik ATI Makassar	95	21,42	29,63	25,95	5	82,00
86	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	97	20,82	31,06	24,90	5	81,78
87	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	66	21,52	30,89	24,70	5	82,10
88	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	57	21,75	28,93	23,42	5	79,11
89	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	55	22,45	29,00	25,00	5	81,45
90	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	60	22,00	32,11	25,00	5	84,11
91	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	79	22,28	32,38	24,49	5	84,15

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
92	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	60	23,00	27,55	25,00	5	80,55
93	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	56	21,79	30,36	25,00	5	82,14
94	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	63	20,95	28,94	24,76	5	79,65
95	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	47	21,49	31,52	25,53	5	83,54
96	Politeknik Industri Logam Morowali	46	21,30	20,64	24,46	5	71,40
97	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	47	20,74	32,77	25,00	5	83,51
98	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	43	21,74	27,21	25,58	5	79,53
99	Politeknik Industri Petrokimia Banten	16	21,25	27,81	25,94	5	80,00
100	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	22	23,64	23,52	25	5	77,16
<b>Kementerian Perindustrian</b>		<b>5044</b>	<b>22,4</b>	<b>28,72</b>	<b>25,08</b>	<b>5</b>	<b>81,2</b>

Kepala Biro Organisasi dan SDM,

  
 Feby Setyo Haryono

Nomor : R/ 159 /IJ-IND/PW/XII/2023 Jakarta, 18 Desember 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keterangan Atas Penyelesaian  
Tindak Lanjut Hasil  
Pengawasan Internal

Yth.  
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya  
di -  
Surabaya

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor R/41/IJ-IND/PW/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Ikhtisar Hasil Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN pada Balai Diklat Industri Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 4 (empat) temuan dan 9 (sembilan) saran pada TA 2022, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan kami **dapat menyatakan selesai** sesuai dengan lingkup program, anggaran dan BMN yang telah diaudit (Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,  
  
M. RUM



Tembusan :

1. Kepala BPSDMI;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I.

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
PADA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.SPM : R/41/II-IND/PW/III/2023

Tanggal : 13/03/2023

NO.	TEMUAN PENYEBAB / URAIAN RINGKAS	KODE TEMUAN	REKOMENDASI / URAIAN RINGKAS	KODE REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS REKOMENDASI	STATUS TEMUAN	PARAF
1	<p><b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b></p> <p>Perencanaan</p> <p>Balai Diklat Industri Surabaya mendapatkan nilai 8,45 dari bobot maksimal 10 (84,51%). Hal-hal yang sudah optimal/sangat baik pada audit perencanaan yaitu:</p> <p>a. Penerima manfaat kegiatan seluruhnya dimanfaatkan oleh eksternal Kementerian Perindustrian (masyarakat)</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan/dikendalikan sepenuhnya oleh Balai Diklat Industri Surabaya</p> <p>Namun demikian, terdapat hal-hal yang menjadi kelemahan dalam sasaran audit ini yaitu:</p> <p>Dalam Diklat 3 in 1 Telematika, terdapat 8 kompetensi yang dilakukan uji kompetensi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>- Memasang Kabel Fiber Optik Ruangan/Gedung</li> <li>- Mengoperasikan Power Meter</li> <li>- Memasang Konektor Fiber Optic</li> </ul> <p>Melaksanakan</p>	2.03.01	Kepala Balai Diklat Industri Surabaya segera Menyusun panduan Pengisian materi "Membuat Laporan Tulis" [09]	09	<p>Balai Diklat Industri Surabaya akan segera menyusun panduan Pengisian materi "Membuat Laporan Tulis", dengan menyampaikan:</p> <p>a. Nota Dinas R/1339/BPSDMI/BDI-Surabaya/PW/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023</p> <p>b. Nota Dinas B/379/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023</p> <p>c. Nota Dinas B/1-P2K/BPSDMI/BDI-Surabaya/V/2023 tanggal 20 Mei 2023, dengan lampiran Rancangan Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan Diklat 3 in 1 Jinter Tahun 2022 dengan Unit Kompetensi Membuat Laporan Tertulis dan Kode Unit J.61IF000.004.2</p>	SR	selesai	

<p>Penyambungan Fiber Optic dengan Fusion Splicer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penyambungan Fiber Optic dengan Mechanical Splicer</li> <li>- Mengoperasikan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)</li> <li>- Membuat Laporan Tertulis</li> </ul> <p>Dari 8 skema kompetensi tersebut, BDI Surabaya belum mempunyai panduan pengisian untuk SKKNI terkait dengan pelajaran/skema kompetensi "Membuat Laporan Tulis"</p> <p><b>Penyebab :</b> Kelemahan pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan.</p>						<p>selesai</p> 
<p>2 <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b></p> <p>Pelaksanaan Diklat 3 in 1</p> <p>BDI Surabaya mendapatkan nilai 43,35 dari bobot maksimal 50 (86,90%).</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2022, BDI Surabaya telah melaksanakan kegiatan Diklat 3 in 1 yang terdiri dari 5 jenis diklat dan 99 angkatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat Operator Mekanika Garmen 26 angkatan</li> <li>Diklat Operator Garmen 15 angkatan</li> <li>Diklat Pengelasan 11 angkatan</li> <li>Diklat Telematika 46 angkatan</li> <li>Diklat Perakitan Produk Elektronika 1 angkatan</li> </ol>	<p>2.03.02</p>	<p>Kepala BDI Surabaya agar segera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan teguran tertulis kepada penanggung jawab penyelenggaraan diklat 3in1 atas kelemahan pengendalian kegiatan validasi peserta. [05]</li> <li>- Merevisi Pedoman Pelaksanaan Diklat 3in1 sesuai dengan SKKNI terbaru. [09]</li> <li>- Mengusulkan kepada BPSDMI agar fitur upload sertifikat uji kompetensi pada aplikasi SIDIA dapat diakses oleh akun penyelenggara diklat. [09]</li> <li>- Mengusulkan perubahan</li> </ul>	<p>05</p> <p>09</p> <p>09</p> <p>09</p>	<p>Kepala BDI Surabaya telah memberikan teguran tertulis kepada penanggung jawab penyelenggaraan diklat 3in1 atas kelemahan pengendalian kegiatan validasi peserta melalui Nota Dinas No B/380/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023</p> <p>disampaikan screenshot revidu terkait peserta diklat, namun revidu Pedoman Pelaksanaan Diklat 3in1 sesuai dengan SKKNI terbaru.</p> <p>telah disampaikan Notulensi Pembahasan Program Pelatihan Kompetensi untuk Persiapan Kegiatan Diklat 3in1 berbasis masyarakat tanggal</p>	<p>SR</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>SR</p>	

Indikator-indikator kinerja BDI Surabaya yang telah mendapatkan nilai optimal dengan hasil mencapai 100% adalah:

- Kesesuaian Skema Kompetensi diklat 3 in 1 yang digunakan didapatkan bahwa dari 6 jenis diklat yang dilaksanakan keseluruhannya (100%) telah sesuai dengan skema kompetensi yang telah ditetapkan.
- Tidak ditemukan adanya peserta ganda atau peserta yang mengikuti diklat lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran sehingga hasil capaian pada IKK tersebut sebesar 100%.
- Tingkat Kesesuaian Unit Kompetensi pada Uji Kompetensi diklat 3 in 1 yang sesuai SKKNI mencapai 100% (dari 5 jenis diklat yang dilaksanakan keseluruhannya sudah sesuai)
- Keseluruhan materi utama dari 5 jenis diklat 3 in 1 yang dilaksanakan telah dilakukan uji kompetensi sehingga capaian untuk IKK ini adalah sebesar 100%.
- Kriteria peserta telah seluruhnya terpenuhi pada Diklat Perakitan Produk Elektronika.
- Seluruh asesor telah memiliki sertifikat kompetensi pada bidang yang dilakukan asesesi.
- Capaian penempatan peserta diklat 3 in 1 pada perusahaan industri adalah sebesar 3529 orang (100%) dari 3529 peserta dengan kriteria perusahaan yang

pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) terkait dengan persyaratan instruktur sesuai dengan kebutuhan diklat. [09]

26 April 2023 dan daftar hadir rapat pembahasan pedoman serta pedoman telah disampaikan

Telah disampaikan usulan kepada BPSDMI agar ada penambahan fitur upload sertifikat uji kompetensi melalui Nota Dinas No B/436/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Hal Usulan Penambahan Fitur di Aplikasi SIDIA, namun belum dijelaskan agar aplikasi tersebut dapat diakses oleh penyelenggara diklat.

Terkait usulan perubahan pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), BDI Surabaya telah

menyampaikan:

- Surat dari Kepala BDI Surabaya kepada Ketua Tim Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama Nomor b/437/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Perubahan Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- Menindaklanjuti surat tersebut Ketua Tim Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama telah menyampaikan surat jawaban kepada Kepala BDI Surabaya Nomor B/3-P2K/BPSDMI/BDI-Surabaya/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 Perihal Perubahan Pedoman Pelatihan Berbasis

masuk dalam penilaian adalah perusahaan industri yang berstatus badan hukum serta perusahaan yang tidak berstatus badan hukum yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Industri.

Namun masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan diklat 3 in 1 sebagai berikut:

a. Peserta Diklat yang tidak sesuai dengan kriteria.

Terdapat peserta diklat 3 in 1 yang tidak memenuhi persyaratan peserta diklat 3 in 1 dengan rincian sebagai berikut:

1) Diklat Mekanika Garmen

- Terdapat peserta dengan pendidikan dibawah SMP/ sederajat (persyaratan pendidikan minimal untuk diklat mekanika garmen) sebanyak 1 dari 650 peserta diklat 3 in 1 (0,15%);

2) Diklat Operator Garmen

- Terdapat peserta dengan pendidikan dibawah SMP/ sederajat (persyaratan pendidikan minimal untuk diklat operator garmen) sebanyak 22 dari 1429 peserta diklat 3 in 1 (1,54%);

3) Diklat Pengelasan

- Terdapat peserta dengan pendidikan dibawah SMA/ sederajat (persyaratan pendidikan minimal untuk diklat pengelasan) sebanyak 5 dari 270 peserta diklat 3 in 1 (1,82%);

4) Diklat Telematika

- Terdapat peserta dengan

Kompetensi (PBK)

3. Terlampir

Pelatihan

Pedoman Berbasis

Kompetensi Diklat 3 in 1

Operator Garmen. Dalam

halaman 4, tenaga pengajar

terdiri dari fungsional

widyaiswara dan instruktur

BDI Surabaya serta tim

instruktur yang berasal dari

asosiasi industri dan

perusahaan industri yang

memiliki kualifikasi

sebagaimana persyaratan

dalam Skema Program

Pelatihan Program Berbasis

Kompetensi.

- terlampir daftar hadir ,

notulensipembahasan buku

prdoman dan program

pelatihan berbasis

kompetensi untuk persiapan

kegiatan diklat 3 in 1

berbasis aspirasi masyarakat

tahun 2023

- terlampir

program berbasis

kompetensi diklat 3 in 1

teknisi perawatan AC

- terlampir SK Kepala BDI

Surabaya nomor 32 tahun

2023 tentang penetapan

program pelatihan berbasis

kompetensi diklat 3 in 1

teknisi perawatan AC BDI

Surabaya

pendidikan dibawah SMA/ sederajat (persyaratan pendidikan minimal untuk diklat telematika) sebanyak 11 dari 1150 peserta diklat 3 in 1 (0,96%).

b. Skema Kompetensi

Terdapat skema kompetensi pada Diklat Telematika yang tidak dilakukan pemberian pengajaran secara khusus pada saat pelaksanaan diklat, yaitu materi "Membuat Laporan Tertulis" sesuai dengan SKKNI nomor 101 tahun 2018 tentang kategori informasi dan komunikasi golongan pokok bidang telekomunikasi bidang instalasi fiber optik.

c. Aplikasi SIDIA

Penggunaan aplikasi SIDIA belum sepenuhnya dalam pelaksanaan Diklat 3 in 1, yaitu seluruh diklat belum memanfaatkan fitur upload Sertifikat Uji Kompetensi.

d. SBKK

Keseluruhan anggaran Diklat belum ditetapkan sebagai Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), khususnya untuk diklat yang dilaksanakan di BDI Surabaya (in-site) sehingga capaian pada IKK ini masih 0%.

e. Instruktur

Dari 150 instruktur, 3 instruktur belum memiliki sertifikat Training of Trainer (TOT) yang merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki instruktur diklat 3 in 1 sebagaimana persyaratan dalam pedoman penyelenggaraan diklat 3 in 1

<p>sekitar (0,93%)</p> <p><b>Penyebab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya pengendalian intern pada saat validasi calon peserta melalui aplikasi SIDIA</li> <li>- Pada saat pelaksanaan Diklat Garmen, BDI Surabaya belum mengetahui kalau sudah terdapat SKKNI terbaru</li> <li>- Fungsi dari fitur rekrutmen sama dengan fungsi pendaftaran peserta, dan para peserta sudah mendaftarkan diri melalui fitur pendaftaran</li> <li>- Instruktur yang direkrut sudah mempunyai pengalaman kerja yang memadai</li> </ul>					SR	selesai
<p>3</p> <p><b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b></p> <p>Optimalisasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri</p> <p>BDI Surabaya mendapatkan nilai 5,42 atau sebesar 54,2 % dari bobot maksimal 10.</p> <p>Berdasarkan hasil audit pada optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, ditemukan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan aplikasi Monev LKPP, Realisasi Capaian Tagging PDN dalam PBJ pada BDI Surabaya adalah sebesar 50,43%.</li> <li>- BDI Surabaya masih memiliki kelemahan dalam capaian P3DN melalui Eproc (Non Tender, Pencatatan Non Tender, Bela Pengadaan E-Purchasing, Pencatatan Swakelola) yaitu masih sebesar 5,42%, dengan nilai akhir 54,20%.</li> </ul>	1.04.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BDI Surabaya memberikan surat teguran tertulis terhadap PPK dan Pejabat pengadaan atas kelalaian dalam memanfaatkan aplikasi E-PROC; [05]</li> <li>- Kepala BDI Surabaya menginstruksikan PPK dan pejabat pengadaan untuk memanfaatkan aplikasi E-PROC terutama dalam bela pengadaan/toko daring dan pencatatan swakelola [06]</li> </ul>	05 06	<p>Kejala BDI Surabaya telah memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan melalui surat nomor B/438/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Dan yang bersangkutan membuat pernyataan.</p> <p>Kejala BDI Surabaya telah menginstruksikan PPK dan Pejabat Pengadaan melalui surat nomor B/439/BPSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Dan yang bersangkutan telah memanfaatkan aplikasi E-PROC terutama dalam bela pengadaan/toko daring dan pencatatan swakelola sebagaimana screenshot terlampir.</p>	SR	selesai

<p><b>Penyebab :</b> Kelemahan pengendalian internal pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik dan tagging PDN.</p>					SR	selesai
<p>4 <b>KEUANGAN</b> Kelemahan dalam proses pengadaan barang/jasa Pada TA 2022 terdapat pengadaan bahan dan konsumsi Peserta Diklat 3In1 sbb: 1. Belanja bahan Realisasi Belanja Bahan kegiatan Diklat 3In1 (perlengkapan peserta, bahan praktikum, penggantian materi, cetak tulis sertifikat, dokumentasi dan pelaporan, spanduk, dan penulisan dan cetak buku pedoman) adalah sebesar Rp4.683.378.075 dengan rincian: a. Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri TPT (Tekstil Dan Produk Tekstil): 1) Diklat 3 In 1 Operator Garmen On-site, 14 angkatan, Rp.1.268.155.450,00 2) Diklat 3 In 1 Operator Garmen In-site, 1 angkatan, Rp.23.854.400,00 3) Diklat 3 In 1 Mekanik Garmen, 26 angkatan, Rp.462.397.500,00 b. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Elektronik: 1) Diklat 3 In 1 Elektronika, 1 angkatan, Rp.28.616.000,00 2) Diklat 3 In 1 Joiner, 46 angkatan,</p>	1.04.03	<p>Kepala BDI Surabaya agar: - Memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan atas kelalaiannya dalam pelaksanaannya PBJ. [05] - Melakukan reuiu terkait berjenjang spesifikasi kelengkapan teknis pengadaan bahan dan konsumsi untuk TA 2023 [06]</p>	05 06	<p>Kepala BDI Surabaya telah memberikan teguran tertulis kepada PPK dan Pejabat Pengadaan melalui surat nomor B/440/BPSSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Dan yang bersangkutan telah membuat pernyataan. Kepala BDI Surabaya telah menginstruksikan PPK dan Pejabat Pengadaan melalui surat B/441/BPSSDMI/BDI-Surabaya/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Dan yang bersangkutan telah membuat pernyataan. - nota sesuai reuiu berjenjang tanggal B/4-PPK/BPSSDMI/BDI-Surabaya/V/2023 tanggal 12 mei 2023 - terlampir pelaksanaan kelengkapan spesifikasi teknis pengadaan bahan dan konsumsi untuk TA 2023</p>	SR	

<p>Rp.2.034.014.500,00</p> <p>c. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat 3 In 1 Bidang Pengelasan, 11 angkatan, Rp866.340.225,00</li> <li>2. Penyediaan konsumsi penyelenggaraan 99 diklat sebesar Rp2.998.024.000</li> </ul> <p>Berdasarkan audit, ditemukan kelemahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SPK dan dokumen pengadaan konsumsi melalui jasanya tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan disepakati, seperti item (rincian) menu makanan dan snack;</li> <li>b. SPK dan dokumen pengadaan bahan tidak menjelaskan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan disepakati.</li> </ul> <p><b>Penyebab :</b> Ketidaktepatan PPK dan pejabat pengadaan dalam pelaksanaan PBJ.</p>				
--	--	--	--	--



**INSPEKTORAT JENDERAL**